



**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN PELAYANAN
PUBLIK TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN
PADA BAGIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR**

Skripsi

**Dibuat Oleh:
Theresia May Siski Sihotang
022116249**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

2021



**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN PELAYANAN
PUBLIK TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN
PADA BAGIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Manajemen
Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



(Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA., CMA., CCSA.,
CA., CSEP., QIA)

Arief

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN PELAYANAN
PUBLIK TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN
PADA BAGIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR**

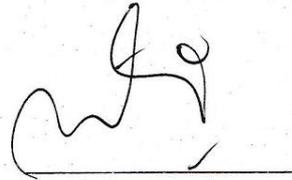
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari : Jum'at, 06 Agustus 2021

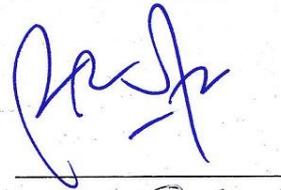
Theresia May Siski Sihotang
022116249

Menyetujui,

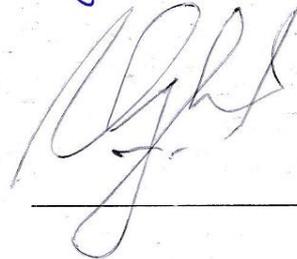
Ketua Penguji Sidang
(Dr. Retno MartantiEndah Lestari, SE., Msi.,
CMA., CAPM)



Ketua Komisi Pembimbing
(Rochman Marota, S.E., Ak., M.M., CA., CPA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Sigit Edi, Drs., AK., M.M.)



PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Theresia May Siski Sihotang
NPM : 022116249
Judul Skripsi/Tesis Desertasi : Pengaruh Pengendalian Internal dan Pelayanan Publik Terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi/Tesis Desertasi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir Skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juni 2021



Theresia May Siski Sihotang
022116249

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2021

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Theresia May Siski Sihotang. 022116249. Pengaruh Pengendalian Internal dan Pelayanan Publik terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Dibawah bimbingan Rochman Marota dan Sigit Edi. 2021.

Praktik pemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan iklim keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* pada sektor publik. *Pertama*, keterbukaan, *kedua*, integritas, *ketiga*, akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pengendalian internal dan pelayanan publik terhadap transparansi laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian verifikatif dengan metode eskplanatory *survey* yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hasil pengaruh dari suatu variabel ke variabel lainnya. Sampel dalam penelitian ini dilakukan pada pegawai Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang berjumlah 56 pegawai.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pengendalian internal dan pelayanan publik terhadap transparansi laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji F bahwa variabel independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 dan F_{hitung} sebesar 29,450 dimana nilai ($F_{hitung} > F_{tabel}$) ($29,450 > 3,17$), yang berarti bahwa H_3 diterima

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Pelayanan Publik dan Transparansi Laporan Keuangan

ABSTRACT

Theresia May Siski Sihotang. 022116249. The Effect of Internal Control and Public Services on the Transparency of Financial Statements at the Development Planning Agency for Research and Development of Bogor Regency. Under the guidance of Rochman Marota and Sigit Edi. 2021.

Good governance practices can also improve the climate of openness, integrity and accountability in accordance with the basic principles of good governance in the public sector. First, openness, second, integrity, third, accountability. This study aims to determine the effect of internal control and public services on the transparency of the financial reports of the Bogor District Research and Development Planning Agency. This research is a verification research using the method of explanatory survey, which is research conducted to determine the effect of one variable to another. The sample in this study was conducted on employees of the Development Planning Agency for Research and Development of Bogor Regency, totaling 56 employees.

The results showed that there was an effect of internal control and public services on the transparency of the financial reports of the Bogor District Research and Development Planning Agency. This is indicated by the results of the F test that the independent variable has a significance value of 0.000 which means less than 0.05 and Fcount of 29.450 where the value ($F_{count} > F_{table}$) ($29.450 > 3.17$), which means that H3 is accepted.

Keywords: Internal Control, Public Services and Transparency of Financial Statements

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur bagi Tuhan Yesus, oleh karena Anugerah-Nya yang melimpah dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian seminar dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal dan Pelayanan Publik terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat bagi mahasiswa dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan Bogor. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan atau penulisan skripsi masih banyak kekurangan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut membantu atau mendukung dalam kelancaran penyusunan proposal ini:

1. Tuhan Yesus yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran.
2. Kepada orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Bapak. Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA, CSEP, QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si.,CMA.,CAPM.,CAP selaku wakil dekan II Bidang SDM dan keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
6. Bapak. Rochman Marota. S.E.,Ak.,M.M.,CA.,CPA selaku Ketua Komisi Pembimbing penulis yang telah banyak membimbing dan memberikan banyak saran dan dengan penuh kesabaran dalam mengarahkan penulisan proposal penelitian ini.
7. Bapak. Sigit Edi, Drs.,Ak.,M.M. selaku Anggota Komisi Pembimbing penulis yang telah membantu, mengarahkan, memberi saran sehingga dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
8. Ibu Dessy Herlisnawati,SE.,M.Si, selaku dosen wali yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
9. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor
10. Kepada ketiga kaka dan adik Ignasius, Antonius dan Mikhael Willy Sialagga yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses penulisan proposal penelitian ini.

11. Kepada sahabat- sahabat terbaik, seperjuangan dalam perkuliahan, Dita, Alfi , Kamila, Adila, Fiska, Maya, Evi , Afril , Santi dan Rospida yang telah memberi dukungan dalam menyusun proposal Penelitian ini.
12. Kepada seluruh teman-teman Kelas G dan H akuntansi angkatan 2016 atas kebersamaan dan dukungan selama menjadi mahasiswa Akuntansi Universitas Pakuan Bogor.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang sempurna. Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun sehubungan dengan kekurangan dalam proposal penelitian ini ini. Penulis berharap proposal penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Bogor, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iii
HAK CIPTA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian	7
1.3.2. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Praktis	8
1.4.2 Kegunaan Akademis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengendalian Internal	9
2.1.1. Pengertian Pengendalian Internal	9
2.1.2. Tujuan Pengendalian Internal	10
2.1.3. Komponen-komponen Pengendalian Internal.....	12
2.1.4. Unsur-unsur Pengendalian Internal.....	15
2.2. Akuntansi Sektor Publik	16
2.3. Pelayanan Publik	18
2.4. Transparansi Laporan Keuangan	19
2.4.1. Pengertian Transparansi Laporan Keuangan	19
2.4.2. Prinsip Transparansi.....	21
2.4.3. Pengertian Transparansi Laporan Keuangan	21
2.4.4. Dimensi Transparansi Laporan Keuangan.....	22
2.5. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	23
2.5.1. Penelitian Sebelumnya	23
2.5.2. Kerangka Pemikiran	30
2.6. Hipotesis	33

BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1.	Jenis Penelitian	34
3.2.	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	34
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	34
3.3.1.	Jenis Data	34
3.3.2.	Sumber Data	34
3.4.	Operasionalisasi Variabel	35
3.5.	Populasi dan Sampel.....	37
3.6.	Metode Pengumpulan Data.....	38
3.7.	Uji Kualitas Data	38
3.7.1.	Uji Validitas	38
3.7.2.	Uji Reliabilitas	38
3.8.	Metode Pengolahan /Analisis Data	39
3.8.1.	Statistik Deskriptif	39
3.8.2.	Uji Asumsi Klasik	40
3.8.3.	Analisis Regresi Linier Berganda	42
3.8.4.	Uji Hipotesis	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
4.1.	Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor	45
4.2.	Demografi Responden	46
4.3.	Deskripsi Tanggapan Responden	47
4.3.1.	Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Pengendalian Internal.....	47
4.3.2.	Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Pelayanan Publik	51
4.3.3.	Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Transparansi Laporan Keuangan	55
4.4.	Hasil Pengumpulan Data	57
4.5.	Analisis Data.....	60
4.6.	Pembahasan	63
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Simpulan	66
5.2.	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Persepsi Korupsi di Beberapa Negara Asia Tenggara	1
Tabel 2.1.	Penelitian Sebelumnya	24
Tabel 3.1	Operasional Variabel	35
Tabel 3.2	Distribusi Sampel	38
Tabel 3.3.	Pengambilan Keputusan Autokorelasi	40
Tabel 4.1	Jenis Kelamin Responden	46
Tabel 4.2	Pendidikan Responden	46
Tabel 4.3	Masa Jabatan Responden.....	47
Tabel 4.4	Weighted Mean Score Variabel Pengendalian Internal	47
Tabel 4.5	Weighted Mean Score Variabel Pelayanan Publik.....	50
Tabel 4.6	Weighted Mean Score Variabel Transparansi Laporan Keuangan.....	54
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Internal (X_1)	57
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Publik (X_2)	57
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Laporan Keuangan (Y) ..	58
Tabel 4.10	Hasil Uji Reliabilitas	59
Tabel 4.11	Analisis Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4.12	Hasil Uji Normalitas	60
Tabel 4.13	Hasil Uji Multikolinearitas	61
Tabel 4.14	Hasil Uji Autokorelasi	62
Tabel 4.15	Hasil Uji Koefisien Regresi Linear Berganda.....	62
Tabel 4.16	Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	64
Tabel 4.17	Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F).....	66
Tabel 4.18	Hasil Uji Koefisien Determinasi	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Konstelasi Penelitian	33
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi	42
Gambar 4.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
Lampiran 2 Tabulasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat saat ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik harus direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tantangan untuk merealisasikan tujuan diatas sangatlah berat, mengingat perilaku usaha dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah selama kurun waktu yang sangat panjang telah tercemar dengan berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup sebagaimana yang diperlihatkan dari hasil survei yang dilakukan oleh *Transparency International* (TI) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana terlihat pada tabel 1. Tingkat korupsi yang tinggi mencerminkan birokrasi yang buruk yang berarti pula bahwa implementasi *good governance* masih jauh dari harapan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* baik dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah, telah dikeluarkan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya. Paket peraturan perundang-undangan tersebut menggambarkan keseriusan jajaran pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tabel 1.1. Indeks Persepsi Korupsi di Beberapa Negara Asia Tenggara

Negara	Indeks Persepsi Korupsi				
	2012	2013	2014	2015	2016
Singapore	9,4	9,3	9,2	9,2	9,3
Malaysia	5,0	5,1	5,1	4,5	4,4
Thailand	3,6	3,3	3,5	3,4	3,5
Indonesia	2,4	2,3	2,6	2,8	2,8
Phillipine	2,5	2,5	2,3	2,4	2,4

Sumber : Transparency International (2012-2016)

Praktik pemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan iklim keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* pada sektor publik. *Pertama*, keterbukaan memang sangat diperlukan untuk

meyakinkan bahwa stakeholders memiliki keyakinan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan terhadap institusi pemerintah dan terhadap pengelolaan kegiatan oleh instansi pemerintah tersebut. Iklim keterbukaan yang diciptakan melalui proses komunikasi yang jelas, akurat, dan efektif dengan pihak stakeholders dapat membantu proses pelaksanaan suatu kegiatan secara tepat waktu dan efektif. *Kedua*, integritas mencakup dua hal pokok yaitu kejujuran dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya, dana, dan urusan publik. Dalam organisasi, integritas ini tercermin pada prosedur pengambilan keputusan dan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. *Ketiga*, akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap individu maupun secara organisatoris pada institusi publik kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan atas pengelolaan sumber daya, dana, dan seluruh unsur kinerja yang diamanatkan kepada mereka.

Secara umum, ketiga prinsip *good governance* tersebut di atas tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana tercantum dalam ketiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara tersebut. Dalam pengelolaan keuangan negara, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan adalah hal yang diutamakan.

Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 menambahkan satu ayat dalam pasal 116. Ayat (4a) pasal 116 berbunyi, untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah. Menurut Steccolini (2012), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel kepada para pengguna potensial. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2014).

Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 mewajibkan laporan keuangan di *review* oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit. *Review* atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tersebut dilakukan oleh inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota. Laporan keuangan yang disajikan harus berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/pimpinan lembaga negara, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pemerintah daerah yang

tujuan rencana kerjanya sudah termasuk dalam rencana kerja untuk jangka waktu yang sudah ditentukan selanjutnya dibuatlah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja tersebut. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam rencana kerja, kepala daerah melaksanakan beberapa fungsi yaitu perencanaan, penyusunan staf, pengarahan dan pengendalian.

Pengendalian intern sangat penting seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel, mengingat terjadi kerugian negara/daerah akibat tidak efektifnya pengendalian intern. Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi, karena pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan. Selain itu, kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat wewenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan kegiatan, serta belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas LHP sebelumnya (IHPS I, 2017:80).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempertegas komitmen pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme pada berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintah. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan bisa mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik, karena Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan tata kelola yang akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diwujudkan dengan pengendalian internal yang baik (Salle, 2016). Pengendalian internal merupakan bentuk pengendalian atas kegiatan pemerintah dan sumber daya yang dimiliki yang bertujuan untuk mendapat keyakinan atas efektivitas dan efisiensi organisasi serta bentuk ketaatan pemerintah daerah. Pengendalian internal yang dilakukan harus memenuhi beberapa unsur yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Unsur-unsur pengendalian internal harus dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaan pengendalian internal dapat berjalan secara tepat, efektif dan efisien. Pengendalian internal diwujudkan dalam bentuk SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) sesuai PP No 60/2018 yang bertujuan untuk memberikan keyakinan

mengenai keandalan pelaporan keuangan pemerintah, dan ketaatan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan (Ledo & Ayem, 2017).

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (2017) mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan Kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun. Potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun. Kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun. Selain itu, terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 (75%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat Ringkasan Eksekutif IHPS I Tahun 2017 pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ daerah senilai Rp509,61 miliar (2%).

Menurut Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis (2014), Badan Pemeriksaan Keuangan menilai kualitas laporan keuangan di daerah rata-rata masih rendah, terlihat dari masih sedikitnya daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. “saya kira pemerintah daerah masih lamban dalam mengejar kualitas laporan keuangannya”. Meski demikian, ia mengatakan penyusunan laporan keuangan yang baik atau tergolong WTP, belum tentu serta merta merepresentasikan pencapaian kesejahteraan rakyat. (<http://www.antaraneews.com/>). Fenomena penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit keuangan pemerintah. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester I tahun 2018, BPK mengungkapkan 33 dari 34 pemerintah provinsi mendapatkan opini WTP sedangkan 298 dari 415 pemkab mendapatkan opini WTP dan 80 dari 93 pemkot meraih opini WTP. (IHPS Semester I 2018).

Pengendalian internal merupakan salah satu fondasi terkuat *good governance*. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data

keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, dan menjamin pengamanan aset negara. Akibat yang ditimbulkan oleh tidak efektifnya pengendalian intern, membutuhkan peran pimpinan instansi pemerintah dan auditor internal untuk menjaga efektifitas pengendalian intern sebagai ikhtiar dalam meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan mencegah tindak Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 PP No. 60 Tahun 2008 diamanahkan agar pimpinan instansi pemerintah menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.

Faktor lain yang mempengaruhi transparansi laporan keuangan adalah pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan layanan publik yang diterima, karena layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif Pemerintah Daerah di mata warga masyarakatnya. Peranan pelayanan publik pada dasarnya membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan, melaksanakan keputusan dan memberi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya.

Pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Pelayanan publik dapat dijadikan standar tolak ukur dari hasil kinerja pemerintah itu sendiri sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang perlu dibenahi. Jika pelayanan publik tersebut belum berhasil terwujud sesuai tujuan maka pelayanan publik belum berjalan dengan baik.

Penelitian terkait transparansi laporan keuangan dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dan mendapatkan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Ratna Purnama Sari (2020) dengan judul “pentingnya pengendalian internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah”. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan daerah; 2) kontrol internal memiliki dampak signifikan pada transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan regional. Penelitian Wirawan (2019) menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Mirza Masyhur (2017) dengan judul pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah Kota Dumai. Hasil penelitian penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, variabel pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Sari (2012) menyimpulkan bahwa pengendalian internal mempengaruhi transparansi laporan keuangan, dengan arah hubungan positif. Hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang kuat dan searah, dimana peningkatan pengendalian internal yang terjadi akan seiring dengan peningkatan transparansi laporan keuangan pemerintah Kota Cimahi.

Penelitian Amelia (2015) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau. Untuk mencapai sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, SKPD Kota Pekanbaru sebagai pemerintah daerah telah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, telah dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Jika dilihat dari uraian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa pada variabel yang sama, masih terdapat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian. Ketidakkonsistenan yang terjadi ini disebut juga dengan *Research Gap*. Untuk memudahkan, peneliti akan merangkum *Research Gap* berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya.

Obyek penelitian ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata terdapat banyak masalah antara lain terkait kurangnya konsistensi perencanaan dan materi hingga permasalahan di lapangan. Disamping itu ruang gerak Pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengaturan pembangunan yang sesuai potensi dan prioritas daerah sangat terbatas.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **Pengaruh Pengendalian Internal dan Pelayanan Publik terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.**

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Terdapat Kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) hal ini berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (2017) terdapat 7.284 (49%) kasus permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI)
2. Terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Negara. Hal ini berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (2017) terdapat 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang merugikan Negara senilai Rp25,14 triliun
3. Adanya perbedaan atau ketidakkonsistean hasil penelitian. Penelitian Amelia (2015) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau. Penelitian Wirawan (2019) menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka penulis menarik kesimpulan dalam suatu rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana pengaruh pelayanan publik terhadap transparansi laporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian internal dan pelayanan publik terhadap transparansi laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan relevan agar dapat dipelajari dan diolah menjadi data yang akurat. Selain itu juga untuk menyimpulkan hasil penelitian mengenai “pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pada Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor”. Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan atau hubungan di antara variabel pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan, menyimpulkan hasil

penelitian, serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan publik terhadap transparansi laporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan pelayanan publik terhadap transparansi laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi tentang keadaan perusahaan serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak instansi dan dapat mendorong agar lebih menyadari pentingnya penyajian informasi laporan keuangan yang berkualitas dan menjadi sumbangan pemikiran dan acuan dalam menentukan kebijakan operasional yang berhubungan dengan transparansi laporan keuangan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pengendalian internal dan pelayanan publik terhadap transparansi laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Serta merupakan sarana belajar yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memahami dan menganalisis sejauh mana teori yang selama ini diperoleh dapat diterapkan dalam memecahkan masalah di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengendalian Internal

2.1.1. Pengertian Pengendalian Internal

Dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah harus tetap berusaha taat kepada koridor peraturan agar dapat tercapainya tujuan pemerintah dengan tepat. Dengan demikian, maka diantisipasi dengan membangun sistem pengendalian internal yang efektif dan menyeluruh. Pengendalian internal yang digunakan dalam sebuah entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut. Oleh karena itu sebelum auditor melakukan audit secara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan harus memahami terlebih dahulu pengendalian internal (Sari, 2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 sebagaimana dikutip Ichlas dkk (2014) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Internal adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPI bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

Menurut COSO (*the committee of sponsoring of organizations of the tread way commissions*) (2019) “*Internal control as “a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance”*”. (Pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yaitu :

Sistem Pengendalian Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mulyadi (2013), pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang). Sementara menurut Coso (2019) sebagaimana dikutip oleh Kresiadanti (2012) bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang ada pada aktivitas operasi organisasi dan merupakan bagian

integral dari proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pengendalian internal merupakan bagian integral dari proses manajemen, karena konsep sebuah pengendalian internal adalah proses (*processes*), dilaksanakan oleh manusia (*effected to people*) dan tujuan yang diharapkan (*objectives*).

Martini, dkk (2019) menjelaskan sistem pengendalian internal ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal terhadap laporan keuangan dilaksanakan untuk mengatur dan memantau keuangan pemerintah daerah sehingga mampu memberikan keandalan atas pelaporan keuangan. Pengendalian internal berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintah dalam mencapai pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Sari, 2012).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien.

2.1.2. Tujuan Pengendalian Internal

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagai dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Tujuan sistem pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan data dan informasi yang handal.
2. Menjaga harta/ kekayaan dan catatan organisasi.
3. Meningkatkan efisiensi operasional.
4. Mendorong ketaatan kepada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.

Sistem Pengendalian Internal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Sistem Pengendalian internal menurut Gelinas (2012) untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari:

1. Tujuan pengendalian proses operasi, yaitu keefektifan operasi (*effectiveness of operations*), keefisienan pegawai terhadap aset (*efficient employment of resources*), dan keamanan aset (*resource security*).

2. Tujuan pengendalian proses informasi, yaitu kebenaran masukan (*input validity*), kelengkapan masukan (*input completeness*), ketelitian masukan (*input accuracy*), kelengkapan dan ketelitian kemutakhiran (*update completeness and accuracy*).

Pengendalian internal dalam pemerintahan dibuat untuk membantu agar organisasi lebih berhasil dalam mencapai tujuan dan juga memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diharapkan. Menurut Arens, dkk yang dialihbahasakan oleh Wibowo (2013:370) bahwa pengendalian internal memiliki tiga tujuan umum yang efektif yaitu:

1. Reliabilitas pelaporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Tujuan pengendalian intern yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut
2. Efisiensi dan efektivitas operasi,
Pengendalian dalam pemerintahan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran pemerintahan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi pemerintahan untuk keperluan pengambilan keputusan.
3. Ketaatan pada hukum dan peraturan
Selain mematuhi ketentuan hukum, organisasi publik, nonpublik, nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem pengendalian internal yaitu untuk menciptakan kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta untuk mencapai tujuan sistem informasi dan sistem operasi. Dimana tujuan sistem operasi berupa jaminan terhadap efektivitas operasi, efisiensi operasi dalam penggunaan sumber-sumber daya, dan keamanan sumber sumber daya. Sedangkan yang menjadi tujuan sistem informasi adalah memberikan jaminan mengenai keabsahan masukan data, kelengkapan masukan data, akurasi masukan data, kelengkapan pemutakhiran, dan output berupa informasi didistribusikan secara tepat sampai kepada pihak pihak yang semestinya.

2.1.3. Komponen-komponen Pengendalian Internal

Unsur-unsur pengendalian SPI yang diterapkan di pemerintahan menurut Permendagri No. 60 tahun 2008 terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Pimpinan instansi pemerintahan wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya, meliputi:

a. Penegakan integritas dan nilai etika

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku.
- 2) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah.
- 3) Menegakan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
- 4) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian internal.
- 5) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah.
- 2) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah.
- 3) Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.
- 4) Memilih pimpinan instansi pemerintahan yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

- 1) Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan
- 2) Menerapkan manajemen berbasis kinerja
- 3) Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP
- 4) Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah
- 5) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah

- 6) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
 - e. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
 - 1) Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah
 - 2) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam instansi pemerintahan
 - 3) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan internal dalam instansi
 - 4) Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategi
 - 5) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pemimpin
 - 6) Penyusunan struktur organisasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan
 - f. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah
 - 2) Pegawai yang diberikan wewenang dan memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam instansi pemerintahan yang bersangkutan
 - 3) Pegawai yang diberi wewenang dan memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab terkait dengan penerapan SPIP
 - g. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai
 - 2) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen
 - 3) Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
 - h. Perwujudan peran aparat pegawai intern pemerintah yang efektif
Perwujudan peran aparat pegawai intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

i. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintahan terkait

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintahan diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko

Risiko merupakan hal-hal yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan. Identifikasi terhadap risiko (Risk Identification) diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi kejadian yang dapat menghambat dan menghalangi terwujudnya tujuan organisasi. Risiko yang biasa dihadapi meliputi risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko hukum/legal. Pimpinan instansi pemerintahan wajib melakukan penilaian risiko, penilaian risiko terdiri atas:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- 1) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi
- 2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko
- 3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko

b. Analisis risiko

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko

3. Kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintahan. Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta prosedur, serta memastikan bahwa tindakan tersebut telah dilaksanakan secara efektif. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko dapat dibagi menjadi 2 jenis tindakan yaitu tindakan preventif dan tindakan mitigasi. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum kejadian yang berisiko berlangsung, sedangkan tindakan mitigasi adalah tindakan yang dilakukan setelah kejadian berisiko berlangsung, dalam hal ini tindakan mitigasi berfungsi.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang sudah diolah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Informasi yang berkualitas tentunya harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Penyampaian informasi yang tidak baik dapat mengakibatkan kesalahan interpretasi penerima informasi. Pimpinan instansi pemerintahan wajib

mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

5. Pemantauan pengendalian internal

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya.

2.1.4. Unsur-unsur Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2013:130) unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4 unsur, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
3. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

Mardi (2015: 60) menjelaskan agar suatu sistem pengendalian internal dapat berjalan secara efektif seperti yang diharapkan, harus memiliki unsur pokok yang dapat mendukung prosesnya.

Adapun unsur pokok sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka pemisahan tanggung jawab secara tegas berdasarkan fungsi dan tingkatan unit yang dibentuk. Prinsip dalam menyusun struktur organisasi, yaitu pemisahan antara setiap fungsi yang ada dan suatu fungsi jangan diberi tanggung jawab penuh melaksanakan semua tahapan kegiatan, hal ini bertujuan agar tercipta mekanisme saling mengendalikan antarfungsi secara maksimal.
2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi. Struktur organisasi perlu dilengkapi dengan uraian tugas yang mengatur hak dan wewenang masing-masing tingkatan beserta seluruh jajarannya.

Uraian tugas harus didukung prosedur berbentuk peraturan pelaksanaan tugas disertai penjelasan mengenai pihak-pihak yang berwenang mengesahkan kegiatan, kemudian berhubungan dengan pencatatan yang harus disertai juga dengan prosedur yang baku. Prosedur pencatatan yang baik menjamin ketelitian dan keandalan data dalam perusahaan. Transaksi terjadi apabila telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan setiap dokumen memiliki bukti yang sah, ada paraf dan tanda tangan pejabat yang member otorisasi.

3. Pelaksanaan kerja secara sehat. Tata kerja secara sehat merupakan pelaksanaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal yang ditunjukkan dalam beberapa cara. Unsur kehati-hatian (*prudent*) penting dijaga agar tidak seorang pun menangani transaksi di awal sampai akhir sendirian sehingga perlu melakukan *rolling* antar pegawai dan menghindari kecurangan.
4. Pegawai berkualitas. Salah satu unsur pokok penggerak organisasi ialah karyawan-karyawan harus berkualitas agar organisasi memiliki citra yang berkualitas. Secara umum kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak. Tidak hanya berkualitas, tapi kesesuaian tanggung jawab dan pembagian tugas perlu diperhatikan. Pegawai yang berkualitas dapat ditentukan berdasarkan proses rekrutmen yang dilakukan kepada mereka, apakah berbasis profesionalisme atau berdasarkan *cavity* (kedekatan teman).

Unsur-unsur tersebut diatas adalah sangat penting dan harus diterapkan secara bersama-sama dalam suatu pemerintah, agar terdapat adanya Sistem Pengendalian Internal yang baik, sebab kelemahan yang serius dalam salah satu diantaranya, pada umumnya akan merintang sistem itu bekerja dengan lancar dan sukses.

2.2. Akuntansi Sektor Publik

Sektor Publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba).

Menurut Bastian (2015:3) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Mardiasmo (2016:2) mendefinisikan “akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”. Halim (2015:143) menyatakan pengertian akuntansi sektor publik sebagai sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi

yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Mardiasmo (2016: 1-2) menjelaskan akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi sektor publik.

Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Menurut Bastian (2015:9) akuntansi sektor publik memiliki beberapa elemen yaitu bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perencanaan Publik;
Perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data informasi yang tersedia saat ini.
2. Penganggaran Publik
Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan walau wajar-wajar saja jika dikatakan pengelola/pengguna anggaran dan manajer publik secara bertahap dan sistematis.
3. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Ini berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.
4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pembiayaan. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa komponen laporan seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan dilengkapi oleh Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Audit Sektor Publik

Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pengelola asset Negara lainnya. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum.

7. Pertanggungjawaban Publik

Pertanggungjawaban publik adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya, berdasarkan sistem pemerintah yang berlaku.

2.3. Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/ satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah.

Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik pelayanan yang diselenggarakan serta memperhatikan lingkungan. Dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan masyarakat dan/ atau stakeholder lainnya (termasuk aparat birokrasi) untuk mendapatkan saran dan masukan dan membangun

kepedulian dan komitmen. Sinambela (2015: 6) menjelaskan indikator pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. **Transparan**
Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas**
Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Kondisional**
Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. **Partisipatif**
Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan Hak**
Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
6. **Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Pelayanan** yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

2.4. Transparansi Laporan Keuangan

2.4.1. Pengertian Transparansi

Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini masyarakat luas. Transparansi (*transparancy*) secara harafiah adalah jelas (*obvius*), dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan (Tahir, 2015). Pemerintah yang baik akan transparan terhadap rakyat baik tingkat pusat maupun daerah dan harus dibangun dalam rangka kebebasan informasi yang tersedia harus memadai dan dapat dimengerti.

Mardiasmo (2016) mendefinisikan transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Menurut Sabarno (2015) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya

keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Tanjung (2016) transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.

Pendapat para ahli di atas mengenai definisi transparansi maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan antara para pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi mengenai sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu organisasi. Transparansi tata kelola keuangan merupakan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai sumber informasi keuangan.

Transparansi mempunyai makna dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat Perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara pemerintah melaksanakan keterbukaan kepada masyarakatnya. Mulai dari pembuatan kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) Sering terjadinya KKN karena pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan tidak melakukan transparansi yang benar kepada masyarakatnya. Tidak memberikan informasi-informasi mengenai jalannya pemerintahan itu sendiri sehingga KKN terus terjadi (Tahir, 2015).

Adanya transparansi menjadikan pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pemerintah sendiri dan masyarakat luas yang menjadi sasaran kebijakan. Transparansi dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan transparansi oleh pemerintah daerah dapat menjamin bahwa kemandirian terhadap daerah akan segera dapat teralisasi.

Karianga (2015) mengemukakan bahwa keterbukaan dalam prosedur memungkinkan masyarakat untuk ikut mengetahui, ikut memikirkan, bermusyawarah, serta ikut memutuskan dalam rangka pelaksanaan. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

2.4.2. Prinsip Transparansi

Menurut Meutiah (2014) Transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu:

1. Komunikasi publik, dan
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “*watchdog*” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

2.4.3. Pengertian Transparansi Laporan Keuangan

Sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan. Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan (Renyowijoyo, 2015). Hood dalam Lubis (2017) menyatakan bahwa transparansi sebagai sebuah konsep mencakup transparansi peristiwa atau kejadian (informasi yang terbuka tentang input, *output*, dan *outcome*), transparansi proses (informasi yang terbuka tentang transformasi yang berlangsung antara input, output, dan *outcome*), transparansi real-time (informasi yang dirilis segera), atau transparansi retrospektif (informasi tersedia berlaku surut).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimengerti. Menurut Sedarmayanti dalam Sari (2014) transparansi adalah tata kelola pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Transparansi adalah bahwa individu, kelompok, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang berhubungan dengan masalah tertentu.

Menurut Wirawan (2019) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transparansi yang baik

mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Sedangkan Purba (2014) menjelaskan transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material yang relevan dengan perusahaan. Meijer (2013:5) mendefinisikan transparansi sebagai konsep yang luas yang dikaitkan dengan ketersediaan dan akses informasi dan manfaatnya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini merujuk pada ketersediaan informasi tentang organisasi pemerintahan yang memungkinkan masyarakat dan pelaku eksternal lainnya mengawasi dan mengakses pekerjaan internal dan kinerja dari organisasi publik. Menurut Maulidiyah (2019) Transparansi merupakan Informasi yang berhubungan dengan aktivitas sumber daya publik terhadap masyarakat maupun pihak yang membutuhkan yang diberikan oleh pemerintah secara terbuka.

Dengan demikian, transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

2.4.4. Dimensi Transparansi Laporan Keuangan

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2016:19) adalah sebagai berikut:

1. *Invormativeness* (informatif)
Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif antara lain:
 - a. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
 - b. Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
 - c. Jelas. Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 - d. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

- e. Dapat diperbandingkan Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
 - f. Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
2. *Disclosure* (pengungkapan)
Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.
- a. Kondisi Keuangan.
Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
 - b. Susunan pengurus.
Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
 - c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.
Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.5. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.5.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Diana Sari (2012) Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen Pengendalian Internal Variabel Dependen Transparansi Laporan Keuangan	Pengendalian Internal - Lingkungan pengendalian - Penilaian Resiko - Kegiatan pengendalian - Informasi dan komunikasi - Pemantauan pengendalian intern Transparansi Laporan Keuangan	Penelitian ini menggunakan metode verifikatif melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan suatu perhitungan statistika.	Hasil penelitian menunjukkan: 1. Persepsi responden di Kota Cimahi dilihat dari pendekatan pengendalian internal yang meliputi keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, pengamanan asset Negara, dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan secara umum termasuk kedalam kategori yang baik. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya responden yang menilai positif terhadap pengendalian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Invormativeness</i> (informatif) - <i>Disclosure</i> (pengungkapan) 		<p>internal di Kota Cimahi.</p> <p>2. Transparansi laporan keuangan yang ada di Pemerintah Kota Cimahi kedalam kategori yang baik. Hal ini dapat terlihat dari populasi hasil kuesioner yang diteliti oleh peneliti di Kota Cimahi.</p> <p>3. Berdasarkan analisis statistik maka diperoleh koefisien determinasi (KD) 51,22% dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal mempengaruhi transparansi laporan keuangan, dengan arah hubungan positif. Hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang kuat dan searah, dimana peningkatan pengendalian internal yang terjadi akan seiring dengan peningkatan transparansi laporan keuangan pemerintah Kota Cimahi</p>
2	Nasrul Kahfi Lubis (2017) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan	Variabel Independen Transparansi Pelaporan Kualitas Pelaporan Keuangan	Transparansi Laporan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> - <i>Invormativeness</i> (informatif) - <i>Disclosure</i> (pengungkapan) Kualitas Pelaporan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Relevan - Andal - Dapat dibandingkan - Dapat dipahami 	Penelitian ini menggunakan metode uji statistik regresi linier berganda dan analisis jalur	Pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa secara simultan tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Secara parsial tekanan eksternal dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan, sedangkan komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa secara simultan tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Secara parsial ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen dan transparansi

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan melalui transparansi pelaporan keuangan. Tekanan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan melalui transparansi pelaporan keuangan. Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan melalui transparansi pelaporan keuangan. Komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan melalui transparansi pelaporan keuangan.</p>
3	Ratna Purnama Sari (2020) Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Independen Pengendalian Internal Dependen Akuntabilitas	Pengendalian Internal - Lingkungan pengendalian - Penilaian Resiko - Kegiatan pengendalian - Informasi dan komunikasi - Pemantauan pengendalian intern Akuntabilitas - Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran - Akuntabilitas Manajerial - Akuntabilitas Program - Akuntabilitas	Sampel penelitian ini berjumlah 370 responden dengan metode <i>purposive sampling</i> . Data dikumpulkan dengan metode <i>survey</i> kuesioner dengan menyebar kuesioner. Analisis data menggunakan alat statistik SPSS.	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan cakupan populasi seluruh SKPD di Kabupaten Klaten. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i> dengan kriteria tertentu. Responden adalah 64 karyawan SKPD di Kabupaten Klaten.

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			Kebijakan - Akuntabilitas Finansial		
4	Faturrahman Muafi (2018) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Intern, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan <i>Good Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara	Independen Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Intern, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan <i>Good Governance</i> Kualitas Laporan Keuangan	Pengendalian Internal - Lingkungan pengendalian - Penilaian Resiko - Kegiatan pengendalian - Informasi dan komunikasi - Pemantauan pengendalian intern Kualitas Pelaporan Keuangan - Relevan - Andal - Dapat dibandingkan Dapat dipahami	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan <i>survey</i> . Pengumpulan data melalui kuesioner dengan menggunakan skala <i>likert</i> dan studi kepustakaan. Analisis menggunakan analisis regresi berganda	Berdasarkan hasil analisis secara parsial dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) terhadap kualitas Laporan Keuangan (Y) ditunjukkan oleh nilai signifikansi $t 0.007 < 0.05$, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Efektivitas Pengendalian Intern (X2) terhadap kinerja manajerial (Y) ditunjukkan dengan nilai signifikansi $t 0.954 > 0.05$, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) terhadap kinerja manajerial (Y) ditunjukkan dengan nilai signifikansi $t 0.793 > 0.05$, terdapat pengaruh signifikan antara variabel <i>Good Governance</i> (X4) terhadap kinerja Manajerial (Y) ditunjukkan dengan nilai signifikansi $t 0.013 > 0.05$. Berdasarkan hasil analisis secara simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Intern, Aksesibilitas Laporan Keuangan, <i>Good Governance</i> , terhadap Kualitas Laporan Keuangan
5	Reky Candra Wirawan (2019) Antecedent Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Pemerintah Daerah Kota Magelang)	Independen Transparansi Laporan Keuangan	Transparansi Laporan Keuangan - <i>Invormativeness</i> (informatif) - <i>Disclosure</i> (pengungkapan)	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei dengan	Hasil pengujian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, pengendalian internal, sumber daya manusia, dan komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan karakteristik kualitatif, aksesibilitas, dan tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan. Artinya semakin meningkatnya karakteristik

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				<p>menyebarkan kuesioner kepada responden yang akan dituju. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik <i>purposive sampling</i>. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah: (a) Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada OPD. (b) Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan. (c)</p>	<p>kualitatif, aksesibilitas, dan tekanan eksternal maka akan meningkat pula transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang.</p>
6	<p>Mirza Masyhur (2017) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Kota Dumai</p>	<p>Independen Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal Dependen Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Kota Dumai</p>	<p>Pengendalian Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan pengendalian - Penilaian Resiko - Kegiatan pengendalian - Informasi dan komunikasi - Pemantauan pengendalian intern <p>Transparansi Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Invormativeness</i> (informatif) - <i>Disclosure</i> (pengungkapan) <p>Akuntabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas 	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang akan dituju. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik <i>purposive sampling</i>.</p>	<p>Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			Hukum dan Kejujuran - Akuntabilitas Manajerial - Akuntabilitas Program - Akuntabilitas Kebijakan - Akuntabilitas Finansial		
7	Salomi J. Hehanussa (2015) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon	Independen Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dependen Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Pengendalian Internal - Lingkungan pengendalian - Penilaian Resiko - Kegiatan pengendalian - Informasi dan komunikasi - Pemantauan pengendalian intern Transparansi Laporan - <i>Invormativeness</i> (informatif) - <i>Disclosure</i> (pengungkapan) Akuntabilitas - Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran - Akuntabilitas Manajerial - Akuntabilitas Program - Akuntabilitas Kebijakan - Akuntabilitas Finansial	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang akan dituju. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik <i>purposive sampling</i> .	Hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah juga ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bukti empiris juga memperlihatkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
8	Rossa Amelia AS (2015) Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Tekanan	Independen Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Komitmen	Pengendalian Internal - Lingkungan pengendalian - Penilaian Resiko - Kegiatan	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer.	Pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau, akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Eksternal Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru)	Pimpinan Dependen Transparansi Pelaporan Keuangan	pengendalian - Informasi dan komunikasi - Pemantauan pengendalian intern Akuntabilitas - Akuntabilitas vertikal - Akuntabilitas horizontal. Tekanan Eksternal - Menekankan aspek-aspek positif	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner	Provinsi Riau, tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau, komitmen pimpinan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau
9	Nurul Hidayah Hasibuan (2018) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Independen Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Komitmen Pimpinan Dependen Transparansi Pelaporan Keuangan	Pengendalian Internal - Lingkungan pengendalian - Penilaian Resiko - Kegiatan pengendalian - Informasi dan komunikasi - Pemantauan pengendalian intern Akuntabilitas - Akuntabilitas vertikal - Akuntabilitas horizontal. Tekanan Eksternal Menekankan aspek-aspek positif	Populasi dalam penelitian ini sebanyak 40 responden. Sampel terpilih dengan menggunakan metode sampling jenuh berjumlah 40 responden. Responden merupakan SKPD Kota Tebing Tinggi.	Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner dengan menggunakan metode regresi linier berganda, uji f dan uji t, terbukti bahwa variabel sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Tebing Tinggi. Secara parsial, sistem pengendalian internal dan penyajian laporan keuangan berpengaruh secara terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi variabel aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Tebing Tinggi
10	Ni Made Asih Ristanti (2014) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi	Independen Pengendalian Internal, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Pimpinan Dependen	Pengendalian Internal - Lingkungan pengendalian - Penilaian Resiko - Kegiatan pengendalian - Informasi dan komunikasi - Pemantauan pengendalian	Populasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat daerah se-Kabupaten Tabanan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan daerah dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> (2) Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)	Penerapan <i>Good Governance</i>	intern Akuntabilitas - Akuntabilitas vertikal - Akuntabilitas horizontal. Penerapan <i>Good Governance</i> Transparansi laporan keuangan	sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 90 responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 19	<i>Good Governance</i> , (3) Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> , (4) Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Diana Sari (2012), Ratna Purnama Sari (2020), Faturrahman Muafi (2018), Mirza Masyhur (2017), Rossa Amelia AS (2015), Nurul Hidayah Hasibuan (2018), Ni Made Asih Ristanti (2014) dimana pengendalian internal sebagai variabel independennya.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Diana Sari (2012), Nasrul Kahfi Lubis (2017), Ratna Purnama Sari (2020), Faturrahman Muafi (2018), Reky Candra Wirawan (2019), Mirza Masyhur (2017), Salomi J. Hehanussa (2015), Rossa Amelia AS (2015), Nurul Hidayah Hasibuan (2018), Ni Made Asih Ristanti (2014). Perbedaannya adalah dimana masing-masing penelitian memiliki obyek penelitian yang berbeda sedangkan obyek penelitian ini pada Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang tentunya datanya berbeda.

2.5.2. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan dan bertujuan untuk mengendalikan kegiatan pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya. Pengendalian internal adalah salah satu cara untuk mengukur, mengarahkan, serta mengawasi atas kegiatan pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai, sehingga semakin baik pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah maka pencapaian tujuan pemerintah yang efektif dan efisien akan tercapai (Sari & Azlina, 2017).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan sistem pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian

intern tersebut harus memuat prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah (PP No. 8 Tahun 2006).

Hasil penelitian Andriani (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah diwajibkan meningkatkan pengendalian internalnya, semakin baik pengendalian internal maka laporan keuangan daerah akan semakin transparan (Salle, 2016).

2. Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Pelayanan publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, dalam akuntabilitas pelayanan publik terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan dan kegiatan bagi penyelenggara pemerintahan terutama dibidang administrasi keuangan baik kepada publik maupun kepada organisasi tempat kerjanya. Dengan akuntabilitas pelayanan publik setiap pegawai harus dapat menyajikan informasi yang lengkap dan benar agar dapat dinilai kinerjanya baik oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya, maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya (Jabbara dan Dwivedi, 2013).

Hariyoso (2014) mengatakan bahwa ada dua bentuk implikasi pelayanan publik yang diperlukan, antara lain: (1) pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus bertanggungjawab dalam menjalankan wewenangnya dengan baik; (2) publik memiliki hak untuk mengontrol, mempertanyakan, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan wewenang tersebut termasuk di dalamnya pemasukan dan pengeluaran anggaran pemerintah.

Salah satu faktor yang sangat menentukan kondisi baik tidaknya kualitas pelayanan publik adalah adanya transparansi dalam pelayanan publik. Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik meliputi segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan yang dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik.

Penelitian Aini et al. (2016) menunjukkan bahwa pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap ransparansi laporan keuangan.

3. Pengaruh Pengendalian Internal dan Pelayanan Publik terhadap Transparansi Laporan Keuangan

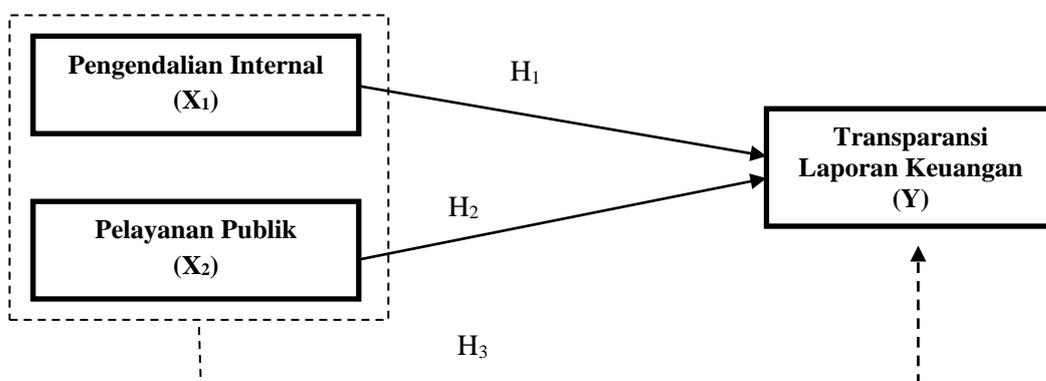
Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam

pengecehan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) (Arfianti, 2014). Yendrawati (2015) efektifitas pengendalian intern dapat mencegah kecurangan akuntansi, sehingga kualitas informasi laporan keuangan dapat ditingkatkan.

Mahmudi (2017: 27) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi. Pengelolaan keuangan yang andal dapat dipengaruhi oleh akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan semua pengelolaan sumber daya publik dan laporan aktivitas. Pengelolaan yang andal juga dapat dipengaruhi oleh transparansi publik, transparansi publik adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh dan didasari pada prinsip bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui. Kedua hal ini menjadi bagian yang paling diamati oleh masyarakat, yaitu pemberian informasi yang transparan. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan prinsip tersebut. Pengelolaan keuangan yang andal adalah pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat luas. Transparansi sendiri bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya.

Dari kerangka penelitian dan hubungan variabel di atas, maka dapat dibuat model penelitian. Dengan model penelitian penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Model penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

2.6. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:96), perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan perkiraan sementara dari penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.
- H₂ : Pelayanan Publik berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan
- H₃ : Pengendalian Internal dan Pelayanan Publik secara simultan berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian verifikatif dengan metode *exploratory survey* yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hasil pengaruh dari suatu variabel ke variabel lainnya. Penelitian ini untuk menguji kebenaran suatu hipotesis dimana dalam penelitian ini yang akan diuji adalah pengaruh pengendalian Internal dan pelayanan publik terhadap transparansi laporan keuangan.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah variabel yang meliputi pengendalian Internal terhadap transparansi laporan keuangan. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian atas variabel-variabel tersebut pada Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *group*, yang merupakan sumber data yang unit analisisnya merupakan respon *group/unit* fungsional dalam organisasi. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis memilih lokasi riset penelitian pada Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1. Jenis Data

1. Data Kualitatif

Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah jumlah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dan hasil kuesioner.

3.3.2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari penyebaran kuesioner kepada Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku, brosur dan artikel yang di dapat dari website yang berkaitan dengan penelitian ini. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian ini.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan penulis melakukan penelitian, maka penulis mengklasifikasikan variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu :

1. Variabel Independen (bebas)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam skripsi ini yang kemudian menjadi variabel independen adalah Pengendalian Internal.

2. Variabel Dependen (terikat)

Yang dimaksud dengan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam skripsi ini yang menjadi variabel dependen adalah Transparansi Laporan Keuangan Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel
Pengaruh Pengendalian Internal dan Pelayanan Publik terhadap Transparansi Laporan Pada Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Lingkungan pengendalian	a. Ditempatkan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan b. Adanya Struktur organisasi dan job deskripsi yang jelas c. kebiJakan prosedur yang jelas	Ordinal
	Penilaian Resiko	a. Mampu mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan diseluruh entitas b. Menganalisis resiko c. Adanya kecurangan dalam penilaian risiko	Ordinal
	Kegiatan pengendalian	a. Upaya untuk mengurangi) risiko dalam pencapaian tujuan b. Mengembangkan kegiatan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan c. Mengimplementasikan pengendalian internal sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan	Ordinal
	Informasi dan komunikasi	a. mendapatkan informasi yang relevan serta berkualitas untuk mendukung pengendalian internal b. mengkomunikasikan secara internal mengenai pengendalian internal untuk mendukung	Ordinal

		komponen lainnya c. mengkomunikasikan perihal pengendalian internal yang relevan kepada pihak eksternal	
	Pemantauan pengendalian intern	a. Melakukan evaluasi berkelanjutan b. mengevaluasi kekurangan pengendalian internal pada pihak yang bertanggung jawab c. mengevaluasi kelebihan pengendalian internal pada pihak yang bertanggung jawab	Ordinal
Pelayanan Publik	Transparan	a. Mudah mendapatkan informasi keuangan b. Laporan Keuangan dan Laporan hasil audit dipublikasikan di website resmi c. dokumen laporan keuangan mudah diperoleh d. Transparansi yang menunjang kinerja pengelolaan keuangan	Ordinal
	Akuntabilitas	a. Rencana strategi dan arah kebijakan melibatkan semua pihak b. Indikator hasil kerja c. digunakan mengevaluasi pengelolaan keuangan d. Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut e. Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan	Ordinal
	Kondisional	a. Pelayanan berpegang pada prinsip efisiensi b. Pelayanan berpegang pada prinsip efektivitas c. Pelayanan publik disesuaikan dengan kondisi saat ini d. Peningkatan kinerja dengan membandingkan laporan keuangan tahun sebelumnya	Ordinal
	Partisipatif	a. Publik dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan b. Peningkatan peran serta publik c. Proses penyelenggaraan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan d. peran serta pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.	Ordinal
	Kesamaan Hak	a. Pemberian pelayanan publik tidak mengutamakan pribadi atau kelompok b. Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan c. Tidak membedakan suku, ras,	Ordinal

		agama, golongan, gender, dan status ekonomi dalam pelayanan d. Pemenuhan hak sebanding dengan kewajiban	
Transparansi Laporan Keuangan	<i>Informativeness</i> (informatif)	a. Informasi laporan keuangan secara lengkap b. Laporan keuangan mudah diakses c. Laporan keuangan disajikan tepat waktu d. Mengakomodasi dan meningkatkan aspirasi/usulan publik.	Ordinal
	<i>Disclosure</i> (pengungkapan)	a. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan publik b. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik c. Publik diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengawasan d. Tanggung jawab yang diberikan kepada publik sebagai dasar pengambilan keputusan	Ordinal

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas nilai yang merupakan hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif atau kualitatif dan karakteristik tertentu atau sekumpulan objek yang lengkap dan jelas sifatnya. Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini dilakukan pada pegawai Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang berjumlah 79 pegawai.

Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2014: 68). Adapun pertimbangan yang ditentukan oleh penulis dalam pengambilan sampel adalah Pegawai bagian Keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan pada tiap entitas akuntansi keuangan daerah dan jika terdapat rangkap jabatan tidak lebih dari 1. Kualifikasi Pegawai penyusun laporan keuangan dalam penelitian ini adalah:

1. Pegawai Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor
2. Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan
3. Kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan
4. Pegawai yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan, penyusunan dan pelaporan keuangan

Dibawah ini merupakan jumlah pegawai yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini

Tabel 3.2. Distribusi Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Pegawai Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor	79 pegawai
	Pegawai yang tidak ikut berpartisipasi dalam pengelolaan, penyusunan dan pelaporan keuangan	(10 pegawai)
2	Para pegawai yang tidak melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan	(8 pegawai)
3	Kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan	(5 pegawai)
Perolehan Sampel		56 pegawai

Sumber: bogorkab.go.id

3.6. Metode Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2014:196), teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan (*questionnaire*) yang diberikan kepada Pegawai Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Kuesioner akan dibagikan secara langsung kepada responden untuk diisi sesuai dengan petunjuk yang ada dan kemudian dikembalikan kepada peneliti untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan metode yang sesuai untuk membuktikan hipotesis yang dibuat.

Metode pengukuran pada kuesioner ini menggunakan skala *likert*. Kuesioner yang disebar kepada konsumen yang membeli produk adalah rata-rata penjualan dari tahun 2016. Menurut Arikunto (2014:134), skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Dalam skala *likert* setiap item instrumen mempunyai gradasi. Adapun gradasi nilai pengukuran dari 1 sampai 5, dengan alternatif jawaban: Tidak Pernah (TP), Jarang (JR), Kadang-kadang (KD), Sering (SR) dan Selalu (SL). Dimana setiap jawaban diberi skor masing-masing sebagai berikut :

1. Jawaban Selalu (SL) diberi skor 5
2. Jawaban Sering (TS) diberi skor 4
3. Jawaban Jarang (JR) diberi skor 3
4. Jawaban Kadang-kadang (KD) diberi skor 2
5. Jawaban Tidak Pernah (TP) diberi skor 1

3.7. Uji Kualitas Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS versi 22. Penggunaan SPSS sebagai alat yang digunakan untuk membantu peneliti mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan data. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pengaruh pengendalian internal (X_1) dan Pelayanan Publik (X_2) terhadap variabel transparansi laporan keuangan (Y).

3.7.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur pertanyaan yang ada dalam kuesioner atau pertanyaan yang dianggap sah jika pertanyaan tersebut mampu mengungkap apa yang ingin diukur. Menurut Sugiono (2014) instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas data dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pertanyaan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi dalam koefisien korelasi.

Analisis dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Uji coba validitas instrumen dilakukan dengan membandingkan antara nilai r_{hitung} dan r_{tabel} . Kriteria dikatakan valid jika koefisien r_{hitung} melebihi atau sama dengan 0,3 r_{tabel} (Sugiyono, 2014). Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *pearson correlation* yang terdapat dalam program SPSS 22. Suatu pernyataan dikatakan valid jika tingkat signifikansi dibawah 0,05 (Ghazali, 2016). Skala yang digunakan dalam penelitian adalah skala likert.

3.7.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya atau reliabel hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner adalah dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*. Instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbrach's Alpha* $\geq 0,60$ (Ghazali, 2016).

3.8. Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (SPSS 22), maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisis data yang telah diukur dalam penelitian. Data hasil penelitian sebelum diuji di SPSS dilakukan coding terlebih dahulu. Coding adalah cara yang memudahkan pengolahan data, semua jawaban atau data tersebut perlu penyederhanaan dengan cara memberikan simbol-simbol yang mudah untuk dimengerti. Setiap variabel yang akan diukur atau dianalisis diberi kode sebagai dasar untuk menentukan skor masing-masing variabel tersebut. Adapun langkah-langkah analisi data sebagai berikut:

3.8.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi deskripsi mengenai karakteristik variabel penelitian. Statistik deskriptif menjelaskan skala jawaban responden pada setiap variabel yang diukur dari nilai rata-rata (mena), standar deviasi, varian, minimum maksimum, kurtosis dan swekness. Rata-rata hitung (mean score) adalah merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Rumusan statistik deskriptif yang digunakan untuk menghitung *mean* adalah sebagai berikut:

$$Me = \frac{\sum X}{N}$$

Keterangan:

Me = Mean (nilai rata-rata)

$\sum X$ = Jumlah sigma X

N = Jumlah sampel

Nilai rata-rata (*mean score*) digunakan untuk mengetahui mencari nilai rata-rata dari skor total keseluruhan jawaban yang diberikan oleh responden.

Adapun perhitungan skor skala likert sebagai berikut :

1. Untuk responden menjawab Selalu (SL) dikali 5
2. Untuk responden menjawab Sering (SR) dikali 4
3. Untuk responden menjawab Jarang (JR) dikali 3
4. Untuk responden menjawab Kadang-kadang (KD) dikali 2
5. Untuk responden menjawab Tidak Pernah (TP) dikali 1

3.8.2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati (2013) persamaan yang diperoleh dari sebuah estimasi dapat dioperasikan secara statistik jika memenuhi asumsi klasik, yaitu memenuhi asumsi bebas multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Pengujian ini dilakukan agar mendapatkan model persamaan regresi yang baik dan benar-benar mampu memberikan estimasi yang handal dan tidak bias sesuai kaidah BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Pengujian ini dilakukan dengan bantuan *software* SPSS. Uji klasik ini dapat dikatakan sebagai kriteria ekonometrika untuk melihat apakah hasil estimasi memenuhi dasar linier klasik atau tidak. Setelah data dipastikan bebas dari penyimpangan asumsi klasik, maka dilanjutkan dengan uji hipotesis yakni uji individual (uji t), pengujian secara serentak (uji F), dan koefisien determinasi (R^2).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak dimana model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Salah satu cara untuk melihat distribusi normal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2016).

Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan analisis grafik yang dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

- a. Jika data menyebar sekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal grafik, maka hal ini ditunjukkan pada distribusi normal sehingga model persamaan regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal grafik maka hal ini tidak menunjukkan pola distribusi normal sehingga persamaan regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian normalitas dapat juga dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov dengan melihat tingkat signifikansinya. Uji ini dilakukan sebelum data diolah. Pendeteksian normalitas data apakah terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji KolmogorovSmirnov. Residual dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov $> 0,05$.

2. Uji Linieritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai pengaruh yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS 22 dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan ketentuan dua variabel dikatakan linear bila signifikansinya kurang dari 0,05. Dengan menggunakan tabel ANOVA pada SPSS, akan dilihat nilai *Sig. linearity* & *Sig. deviation from linearity* dari setiap variabel bebas dengan variabel terikat dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α).

Nilai *Sig. linearity* menunjukkan sejauh mana variabel bebas berbanding tepat di garis lurus. Apabila nilai *Sig. linearity* lebih kecil dari tingkat signifikansi (α), maka regresi linier dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel yang ada. Apabila nilai *Sig. deviation from linearity* lebih besar dari tingkat signifikansi (α), maka regresi linier dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel yang ada.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara pengganggu periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama yang lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson* (DW test). Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas.

Tabel 3.3. *Pengambilan Keputusan Autokorelasi*

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$ $d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i> Tolak	$4 - d_l < d < 4 -$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No Decision</i>	$d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak Ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif		

4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antar variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara

variabel bebas (Ghozali, 2016). Multikolinearitas akan menyebabkan koefisien regresi bernilai kecil dan standar error regresi bernilai besar sehingga pengujian variabel bebas secara individu akan menjadi tidak signifikan.

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila nilai VIF > 10 mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas, sedangkan untuk nilai *tolerance* < 0,1 (10%) menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas.

Hipotesa yang digunakan dalam uji multikolinearitas adalah :

Ho : Tidak ada Multikolinearitas

Ha : Ada Multikolinearitas

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

Jika VIF > 10 atau jika *tolerance* < 0,1 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Jika VIF < 10 atau jika *tolerance* > 0,1 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel tidak bebas (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residualnya (Y prediksi - Y sesungguhnya).

Dasar analisisnya sebagai berikut :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen Priyatno (2018). Apabila semua data sudah memenuhi syarat asumsi klasik, maka selanjutnya data tersebut dapat dilakukan uji regresi. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh atau hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Model persamaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Y = Variabel dependen, dalam hal ini adalah transparansi laporan keuangan

A = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi untuk pengendalian internal

X_1 = pengendalian internal

X_2 = pelayanan publik

e = *Error*

3.8.4. Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2016), ketepatan fungsi regresi dalam mengestimasi nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of fit*-nya. Secara statistik dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik f, dan koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji yang dikehendaki statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). H_0 yang menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

1. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

 - a. Perumusan Hipotesis

$H_0: \beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a: \beta \neq 0$, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
 - b. Menentukan tingkat signifikan (α), yaitu sebesar 5%.
 - c. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan H_0 , yakni dengan melihat nilai signifikan:

Jika $Sig < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima.

Jika $Sig > 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak.
 - d. Pengambilan keputusan.
2. Pengujian Koefisien Regresi (Uji F)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2016:98). Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi linier berganda yang digunakan baik atau tidak. Untuk menguji kedua hipotesis ini diperlukan uji statistik F:

 - a. *Quick look* : Jika signifikansi nilai $F < 0.05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak
 Jika signifikansi nilai $F > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
 - b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_a diterima
3. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Setiap tambahan satu

variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor

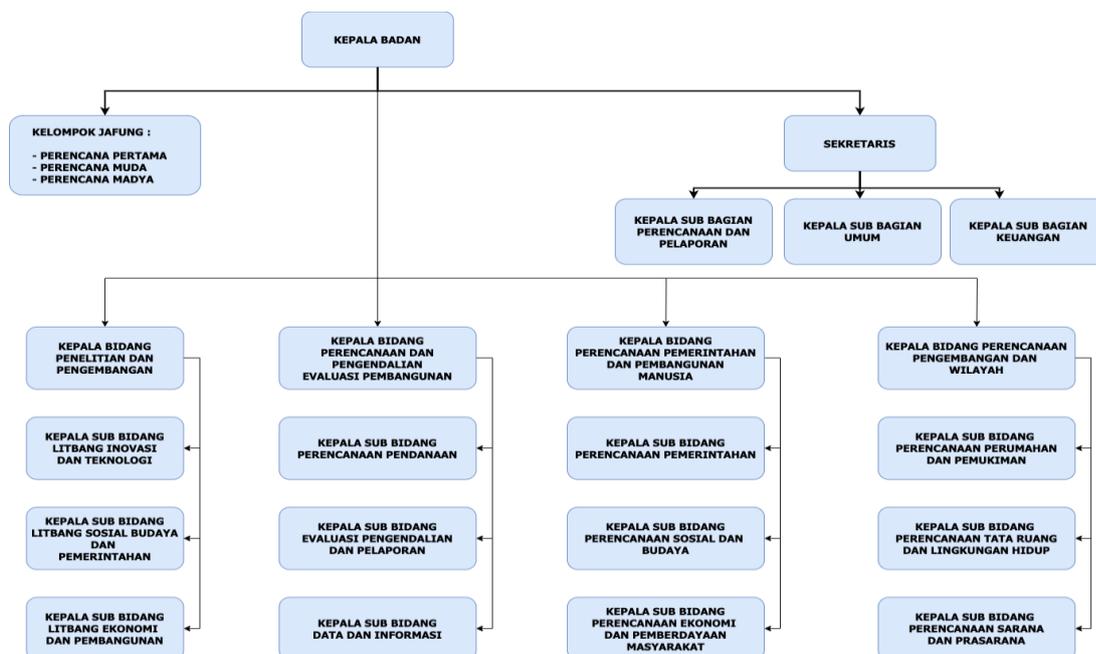
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk berdasarkan pertimbangan:

1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
2. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor berlokasi di Jl Kapten Muslihat No. 21 Bogor Kode Pos 16121.

Berikut struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor



Gambar 4.1. Struktur Organisasi

4.2. Demografi Responden

Deskriptif demografi responden memberikan gambaran mengenai karakteristik responden yang diukur dengan skala nominal yang menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan persentase yaitu jenis kelamin, pendidikan, jabatan dan pengalaman.

Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	F (Orang)	Persen (%)
Laki-laki	34	61
Perempuan	22	39
Jumlah	56	100

Sumber: Hasil penelitian yang diolah

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 34 orang atau sebesar 61%, sedangkan sisanya sebanyak 22 orang atau sebesar 39% dipenuhi oleh jenis kelamin perempuan. Artinya, sebagian besar responden yang mengisi kuesioner adalah laki-laki.

Tabel 4.2
Pendidikan Responden

Pendidikan	F (Orang)	Persen (%)
D3	12	21
S.1	30	54
S.2	14	25
Jumlah	56	100

Sumber: Hasil penelitian yang diolah

Pada tabel 4.5. dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir tersebar dengan kategori Diploma tiga (D3) sebanyak 12 orang atau sebesar 21%. Selanjutnya Strata Satu (S1) sebanyak 30 orang atau sebesar 54% dan Strata dua (S2) sebanyak 14 orang atau dengan persentase 25%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tingkat pendidikan S.1.

Tabel 4.3
Masa Jabatan Responden

Masa Jabatan (tahun)	F (Orang)	Persen (%)
2-3 Tahun	6	11
4-5 Tahun	13	23
> 5 Tahun	37	66
Jumlah	56	100

Sumber: Hasil penelitian yang diolah

Pada tabel 4.6. dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan masa jabatan tersebar dengan masa jabatan 2-3 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 11%.

Selanjutnya masa jabatan 4-5 tahun sebanyak 13 orang atau sebesar 23% dan masa jabatan lebih 5 tahun sebanyak 37 orang atau dengan persentase 66%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden masa jabatan lebih dari 5 tahun.

4.3. Deskripsi Tanggapan Responden

4.3.1 Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Pengendalian Internal

Hasil penelitian variabel pengendalian internal diperoleh melalui jawaban kuesioner hasil penelitian. Hasil jawaban responden kemudian diolah untuk memperoleh skor setiap pertanyaan dengan menggunakan *weighted mean score*. Skor dan persentase yang diperoleh kemudian dianalisis dengan kriteria di bawah ini. Kategori diperoleh dengan membagi interval 20%-100% berdasarkan skala likert, yaitu 1 sampai 5. Kategori pertama diperoleh dengan membagi 100% dengan 5, maka diperoleh batas terendah sebesar 20%, maka selanjutnya membagi 80% dengan 5, maka diperoleh nilai sebesar 16%, tiap batas kemudian ditambahkan dengan nilai tersebut (16%), dimulai dari batas terendahnya (20%).

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka kriteria yang ditetapkan dapat disiapkan sebagai berikut :

1. Skor 20% - 36% : mengindikasikan tanggapan responden mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat buruk.
2. Skor 37% - 52% : mengindikasikan tanggapan responden mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan buruk.
3. Skor 53% - 68% : mengindikasikan tanggapan responden mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan cukup baik.
4. Skor 69% - 84% : mengindikasikan tanggapan responden mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik.
5. Skor 85% - 100% : mengindikasikan tanggapan responden mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat baik.

Tabel 4.4. Weighted Mean Score Variabel Pengendalian Internal

No. Pertanyaan	SL	FX	S	FX	KK	FX	JR	FX	TP	FX	X	IDEAL	%
											RATA-RATA		
Lingkungan pengendalian													
Karyawan ditempatkan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya													
1	15	75	34	136	7	21					4,14	5	98,6
Adanya Struktur organisasi dan job deskripsi yang jelas													
2	31	155	15	60	4	12	6	12			4,27	5	99,4
Terdapat kebijakan prosedur yang jelas mengenai kepegawaian, pengembangan, penilaian prestasi dan kompensasi kepada pegawai													
3	10	50	34	136	7	21	5	10			3,88	5	92,0
Penilaian Resiko													
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mampu mengindetifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan diseluruh entitas													

No. Pertanyaan	SL	FX	S	FX	KK	FX	JR	FX	TP	FX	X	IDEAL	%
											RATA-RATA		
4	26	130	20	80	9	27	1	2			4.27	5	98,6
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.													
5	23	115	23	92	6	18	4	8			4.16	5	92,0
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mempertimbangkan kemungkinan adanya kecurangan dalam penilaian risiko.													
6	20	100	32	128	4	12					4.29	5	97,3
Kegiatan pengendalian													
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja memilih aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi (upaya untuk mengurangi) risiko dalam pencapaian tujuan													
7	24	120	25	100	7	21					4.30	5	95,0
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mengembangkan kegiatan pengendalian secara umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan.													
8	13	65	32	128	6	18	5	10			3.95	5	91,4
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mengimplementasikan pengendalian internal sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan													
9	27	135	25	100			4	8			4.34	5	96,0
Informasi dan komunikasi													
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mendapatkan informasi yang relevan serta berkualitas untuk mendukung pengendalian internal.													
10	25	125	26	104	5	15					4.36	5	92,6
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mengkomunikasikan secara internal mengenai pengendalian internal untuk mendukung komponen lainnya													
11	9	45	37	148	10	30					3.98		89,3
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mengkomunikasikan perihal pengendalian internal yang relevan kepada pihak eksternal													
12	15	75	31	124	5	15	5	10			4.00	5	90,0
Pemantauan pengendalian intern													
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja memilih evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengendalian internal ada dan berfungsi													
13	26	130	26	104	4	12					4.39	5	82,0
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mengevaluasi kekurangan pengendalian internal pada pihak yang bertanggung jawab													
14	14	70	31	124	11	33					4.05	5	76,7
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja menkomunikasikan kekurangan pengendalian internal pada pihak yang bertanggung jawab													
15	8	40	32	128	16	48					3.86	5	85,4
Total	286	1430	423	1692	101	303	30	60					93,6

Data diolah oleh penulis 2021

Keterangan:

SL : Selalu

S : Sering

KK : Kadang-kadang

JR : Jarang

TP : Tidak Pernah

Tabel di atas pada pernyataan karyawan ditempatkan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya menunjukkan 15 responden menyatakan selalu, 34 responden menyatakan sering, 7 responden menyatakan jarang dan tidak ada responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 98,6%.

Pada pernyataan karyawan adanya struktur organisasi dan job deskripsi yang jelas menunjukkan 31 responden menyatakan selalu, 15 responden menyatakan sering, 4 responden menyatakan kadang-kadang, 6 responden menyatakan jarang dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 99,4%.

Pada pernyataan terdapat kebijakan prosedur yang jelas mengenai kepegawaian, pengembangan, penilaian prestasi dan kompensasi kepada pegawai menunjukkan 10 responden menyatakan selalu, 34 responden menyatakan sering, 7 responden menyatakan kadang-kadang, 5 responden menyatakan jarang dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 92,0%.

Pada pernyataan Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mampu mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan diseluruh entitas menunjukkan 26 responden menyatakan selalu, 20 responden menyatakan sering, 9 responden menyatakan kadang-kadang, 1 responden menyatakan jarang dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 98,6%.

Pada pernyataan Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola menunjukkan 23 responden menyatakan selalu, 23 responden menyatakan sering, 6 responden menyatakan kadang-kadang, 4 responden menyatakan jarang dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 92,0%.

Pada pernyataan Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mempertimbangkan kemungkinan adanya kecurangan dalam penilaian risiko menunjukkan 20 responden menyatakan selalu, 32 responden menyatakan sering, 4 responden menyatakan kadang-kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 97,3%.

Pada pernyataan Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja memilih aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi (upaya untuk mengurangi) risiko dalam pencapaian tujuan menunjukkan 24 responden menyatakan selalu, 25 responden menyatakan sering, 7 responden menyatakan kadang-kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 95,0%.

Pada pernyataan Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mengembangkan kegiatan pengendalian secara umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan menunjukkan 13 responden menyatakan selalu, 32 responden menyatakan sering, 6 responden menyatakan kadang-kadang, 5 responden menyatakan jarang dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 91,4%.

Pada pernyataan Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mengimplementasikan pengendalian internal sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan menunjukkan 27 responden menyatakan selalu, 25 responden menyatakan sering, tidak ada responden menyatakan kadang-kadang, 4 responden menyatakan jarang dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 96,0%.

Pada pernyataan Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mendapatkan informasi yang relevan serta berkualitas untuk mendukung pengendalian internal. menunjukkan 25 responden menyatakan selalu, 26 responden menyatakan sering, 5 responden menyatakan kadang-kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 92,6%.

Pada pernyataan Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mengkomunikasikan secara internal mengenai pengendalian internal untuk mendukung komponen lainnya menunjukkan 9 responden menyatakan selalu, 37 responden menyatakan sering, 10 responden menyatakan kadang-kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 89,3%.

Pada pernyataan Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mengkomunikasikan perihal pengendalian internal yang relevan kepada pihak eksternal menunjukkan 15 responden menyatakan selalu, 31 responden menyatakan sering, 5 responden menyatakan kadang-kadang, dan 5 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 90,0%.

Pada pernyataan Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja memilih evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengendalian internal ada dan berfungsi menunjukkan 26 responden menyatakan selalu, 26 responden menyatakan sering, 4 responden menyatakan kadang-kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 82,0%.

Pada pernyataan Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mengevaluasi kekurangan pengendalian internal pada pihak yang bertanggung jawab menunjukkan 14 responden menyatakan selalu, 31 responden menyatakan sering, 11 responden menyatakan kadang-kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 76,7%.

Pada pernyataan Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja menkomunikasikan kekurangan pengendalian internal pada pihak yang bertanggung jawab menunjukkan 8 responden menyatakan selalu, 32 responden menyatakan sering, 16 responden menyatakan kadang-kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 85,4%.

Dari Tabel 4.4 dapat terlihat nilai skor kuesioner atas variabel pengendalian internal adalah 93,6%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pengendalian internal yang dilakukan Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor sangat baik.

4.2.2 Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Pelayanan Publik

Tabel 4.5. Weighted Mean Score Variabel Pelayanan Publik

No. Pertanyaan	SL	FX	S	FX	KK	FX	JR	FX	TP	FX	X	IDEAL	%
											RATA-RATA		
Transparan													
Masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi keuangan di pemerintah daerah													
1	26	130	15	60	10	30	5	10			4.11	5	92.6
Laporan Keuangan dan Laporan hasil audit dipublikasikan di website resmi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor													
2	14	70	17	68	18	54	7	14			3,68	5	97,4
Akses untuk memperoleh dokumen tentang laporan keuangan mudah diperoleh													
3	21	105	22	88	13	39					4.14	5	91,0
Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor													
4	32	60	20	80	4	12					4.50	5	92.52
Akuntabilitas													
Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor													
5	10	50	46	184							4.18	5	95,4
Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor													
6	26	130	17	68	7	21	6	12			4.13	5	93,2
Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut													
7	20	100	16	64	14	42	6	12			3.89	5	95,50
Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor													
8	24	120	23	92	8	24	1	2			4.25	5	93.11
Kondisional													
Pelayanan yang diberikan berpegang pada prinsip efisiensi													
9	19	95	32	128	5	15					4.25	5	94,00
Pelayanan yang diberikan berpegang pada prinsip efektivitas													
10	22	110	30	120	2	6	2	4			4.29	5	91,41
Pelayanan publik disesuaikan dengan kondisi saat ini													
11	23	115	21	84	5	15	7	14			4.07	5	93,00
Peningkatan kinerja dengan cara membandingkan laporan keuangan di tahun sebelumnya													
12	23	115	20	80	7	21	6	12			4.07	5	80.42
Partisipatif													
Publik selalu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan tentang pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor													
13	22	110	26	104	7	21	1	2			4.23	5	92,6

No. Pertanyaan	SL	FX	S	FX	KK	FX	JR	FX	TP	FX	X	IDEAL	%
											RATA-RATA		
Peningkatan peran serta publik dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan pelayanan.													
14	17	85	34	136	5	15					4.21	5	89,3
Proses penyelenggaraan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,													
15	20	100	32	128	1	3	3	6			4.23	5	92,0
Mendorong peran serta pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.													
16	21	105	22	88	5	15	8	16			4.00	5	82,0
Kesamaan Hak													
Pemberian pelayanan publik tidak mengutamakan pribadi atau kelompok													
17	20	100	27	108	6	18	3	6			4.14	5	79,1
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan													
18	27	135	21	84	7	21	1	2			4.32	5	82,4
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi													
19	15	75	35	140	6	18					4.16	5	88,4
Pemenuhan hak sebanding dengan kewajiban yang dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan													
20	17	85	32	128	4	12	3	6			4.13	5	89,16
Total	286	1430	423	1692	101	303	30	60					92,4

Data diolah oleh penulis 2021

Pada pernyataan Masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi keuangan di pemerintah daerah menunjukkan 26 responden menyatakan selalu, 15 responden menyatakan sering, 10 responden menyatakan kadang-kadang, dan 5 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 92,6%.

Pada pernyataan Laporan Keuangan dan Laporan hasil audit dipublikasikan di website resmi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor menunjukkan 14 responden menyatakan selalu, 17 responden menyatakan sering, 18 responden menyatakan kadang-kadang, dan 7 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 97,4%.

Pada pernyataan Akses untuk memperoleh dokumen tentang laporan keuangan mudah diperoleh menunjukkan 21 responden menyatakan selalu, 22 responden menyatakan sering, 13 responden menyatakan kadang-kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 91,0%.

Pada pernyataan Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor menunjukkan 32 responden menyatakan selalu, 20 responden menyatakan sering, 4 responden menyatakan kadang-kadang,

dan tidak ada responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 92,52%.

Pada pernyataan Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor menunjukkan 10 responden menyatakan selalu, 46 responden menyatakan sering, tidak ada responden menyatakan kadang-kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 95,4%.

Pada pernyataan Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor menunjukkan 26 responden menyatakan selalu, 17 responden menyatakan sering, 7 responden menyatakan kadang-kadang, 6 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 93,2%.

Pada pernyataan Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut menunjukkan 20 responden menyatakan selalu, 16 responden menyatakan sering, 14 responden menyatakan kadang-kadang, 6 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 95,50%.

Pada pernyataan Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor menunjukkan 24 responden menyatakan selalu, 23 responden menyatakan sering, 8 responden menyatakan kadang-kadang, 1 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 93,11%.

Pada pernyataan Pelayanan yang diberikan berpegang pada prinsip efisiensi menunjukkan 19 responden menyatakan selalu, 32 responden menyatakan sering, 5 responden menyatakan kadang-kadang, tidak ada responden yang menyatakan jarang dan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 94,00%.

Pada pernyataan Pelayanan yang diberikan berpegang pada prinsip efektivitas menunjukkan 22 responden menyatakan selalu, 30 responden menyatakan sering, 2 responden menyatakan kadang-kadang, 2 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 91,41%.

Pada pernyataan Pelayanan publik disesuaikan dengan kondisi saat ini menunjukkan 23 responden menyatakan selalu, 21 responden menyatakan sering, 5 responden menyatakan kadang-kadang, 7 responden yang menyatakan jarang dan

tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 93,00%.

Pada pernyataan Peningkatan kinerja dengan cara membandingkan laporan keuangan di tahun sebelumnya menunjukkan 23 responden menyatakan selalu, 20 responden menyatakan sering, 7 responden menyatakan kadang-kadang, 6 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 80,42%.

Pada pernyataan Publik selalu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan tentang pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor menunjukkan 22 responden menyatakan selalu, 26 responden menyatakan sering, 7 responden menyatakan kadang-kadang, 1 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 92,6%.

Pada pernyataan Peningkatan peran serta publik dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan pelayanan menunjukkan 17 responden menyatakan selalu, 34 responden menyatakan sering, 5 responden menyatakan kadang-kadang, tidak ada responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 89,3%.

Pada pernyataan Proses penyelenggaraan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan 20 responden menyatakan selalu, 32 responden menyatakan sering, 1 responden menyatakan kadang-kadang, 3 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 92,0%.

Pada pernyataan Mendorong peran serta pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat menunjukkan 21 responden menyatakan selalu, 22 responden menyatakan sering, 5 responden menyatakan kadang-kadang, 8 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 82,0%.

Pada pernyataan Pemberian pelayanan publik tidak mengutamakan pribadi atau kelompok menunjukkan 20 responden menyatakan selalu, 27 responden menyatakan sering, 6 responden menyatakan kadang-kadang, 3 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 79,1%.

Pada pernyataan Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan menunjukkan 27 responden menyatakan selalu, 21 responden menyatakan sering, 7 responden menyatakan kadang-kadang, 1 responden

yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 82,4%.

Pada pernyataan Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi menunjukkan 15 responden menyatakan selalu, 35 responden menyatakan sering, 6 responden menyatakan kadang-kadang, tidak ada responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 88,4%.

Pada pernyataan Pemenuhan hak sebanding dengan kewajiban yang dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan menunjukkan 17 responden menyatakan selalu, 32 responden menyatakan sering, 4 responden menyatakan kadang-kadang, 3 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 89,16%.

Dari Tabel 4.5 dapat terlihat nilai skor kuesioner atas variabel pelayanan publik adalah 92,4%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan publik yang dilakukan Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor sangat baik.

4.2.3 Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Transparansi Laporan Keuangan

Tabel 4.6. Weighted Mean Score Variabel Transparansi Laporan Keuangan

No. Pertanyaan	SL	FX	S	FX	KK	FX	JR	FX	TP	FX	X	IDEAL	%
											RATA-RATA		
Invormativeness (informatif)													
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor memberikan informasi laporan keuangan secara lengkap.													
1	16	80	22	88	13	39	5	10			3,88	5	93.5
Laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor mudah diakses													
2	19	95	28	112	9	27					4,18	5	92.4
Laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor yang disajikan tepat waktu													
3	19	95	27	108	7	21	3	6			4,11	5	90.2
Saya merasa transparansi pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor dapat mengakomodasi dan meningkatkan aspirasi/usulan publik.													
4	20	100	30	120	4	12	2	4			4,21	5	87.52
Disclosure (pengungkapan)													
Tersedianya sarana untuk suara dan usulan publik untuk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor													
5	22	110	25	100	4	12	5	10			4,14	5	92.42
Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik													
6	16	80	26	104	10	30	4	8			3,96	5	91.87
Publik diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor													
7	16	0	28	112	7	21	5	10			3,98	5	93.66
Tanggung jawab yang diberikan kepada publik mengenai laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan													

8	19	95	23	92	9	27	5	10			4,0	5	96,4
Total	147	735	209	836	63	189	29	58					91,8

Data diolah oleh penulis 2021

Pada pernyataan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor memberikan informasi laporan keuangan secara lengkap menunjukkan 16 responden menyatakan selalu, 22 responden menyatakan sering, 13 responden menyatakan kadang-kadang, 5 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 93,5%.

Pada pernyataan Laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor mudah diakses menunjukkan 19 responden menyatakan selalu, 28 responden menyatakan sering, 9 responden menyatakan kadang-kadang, tidak ada responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 92,4%.

Pada pernyataan Laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor yang disajikan tepat waktu menunjukkan 19 responden menyatakan selalu, 27 responden menyatakan sering, 7 responden menyatakan kadang-kadang, 3 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 90,2%.

Pada pernyataan transparansi pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor dapat mengakomodasi dan meningkatkan aspirasi/usulan publik menunjukkan 20 responden menyatakan selalu, 30 responden menyatakan sering, 4 responden menyatakan kadang-kadang, 2 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 87,52%.

Pada pernyataan sarana untuk suara dan usulan publik untuk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor menunjukkan 22 responden menyatakan selalu, 25 responden menyatakan sering, 4 responden menyatakan kadang-kadang, 5 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 92,42%.

Pada pernyataan Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik menunjukkan 16 responden menyatakan selalu, 26 responden menyatakan sering, 10 responden menyatakan kadang-kadang, 4 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 91,87%.

Pada pernyataan Publik diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor menunjukkan 16 responden menyatakan selalu, 28 responden menyatakan sering, 7 responden menyatakan kadang-kadang, 5 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 93,66%.

Pada pernyataan Tanggung jawab yang diberikan kepada publik mengenai laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan menunjukkan 19 responden menyatakan selalu, 23 responden menyatakan sering, 9 responden menyatakan kadang-kadang, 5 responden yang menyatakan jarang dan tidak ada responden menyatakan tidak pernah dengan persentase keseluruhan sebanyak 96,4%.

Dari Tabel 4.6 dapat terlihat nilai skor kuesioner atas variabel pelayanan publik adalah 91,8%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum transparansi laporan keuangan yang dilakukan Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor sangat baik. Walaupun demikian masih terdapat beberapa tanggapan ketidak setujuannya dari responden terutama pada pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat serta transparansi Laporan Keuangan dan Laporan hasil audit.

4.3. Hasil Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini merupakan data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui kuesioner. Penelitian ini untuk menguji kebenaran suatu hipotesis dimana dalam penelitian ini yang akan diuji adalah pengaruh pengendalian internal dan pelayanan publik terhadap transparansi laporan keuangan pada Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.

Populasi dalam penelitian ini dilakukan pada pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor yang berjumlah 79 pegawai. Adapun pertimbangan yang ditentukan oleh penulis dalam pengambilan sampel adalah Pegawai bagian Keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pegawai Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor
2. Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan
3. Kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan

4. Pegawai yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan, penyusunan dan pelaporan keuangan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan penulis menganalisis Pengaruh Pengendalian Internal dan Pelayanan Publik terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor. Sebelum angket diberikan sebagai alat ukur, terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen. Uji coba dilakukan untuk mengetahui apakah butir instrumen sudah memenuhi kualitas instrumen yang baik atau belum. Adapun alat yang digunakan dalam pengujian analisis uji coba instrumen meliputi validitas dan reliabilitas. Kuesioner yang dikirim adalah sebanyak 56 kuesioner dan semua kuesioner kembali sebanyak 56 kuesioner karena sebelumnya peneliti memberikan komitmen kepada responden untuk mengisi kuesioner.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya butir-butir pernyataan instrumen. Butir instrumen yang tidak valid akan (dibuang) dan tidak digunakan. Sedangkan butir instrumen yang valid berarti butir instrumen tersebut dapat digunakan untuk penelitian. Uji validitas menggunakan *product moment pearson* dengan bantuan program SPSS versi 23. Hasil analisis perhitungan validitas butir angket (r_{xy}) dikonsultasikan dengan r_{tabel} dengan taraf signifikansi 5 %. Bila harga $r_{xy} > r_{tabel}$ maka butir instrumen tersebut dikatakan valid. Sebaliknya bila $r_{xy} < r_{tabel}$ maka butir instrumen tersebut dikatakan tidak valid. Hasil pengujian validitas ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Internal (X_1)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Butir 1	0.684	0.361	Valid
Butir 2	0.675	0.361	Valid
Butir 3	0.579	0.361	Valid
Butir 4	0.593	0.361	Valid
Butir 5	0.570	0.361	Valid
Butir 6	0.661	0.361	Valid
Butir 7	0.654	0.361	Valid
Butir 8	0.701	0.361	Valid
Butir 9	0.725	0.361	Valid
Butir 10	0.619	0.361	Valid
Butir 11	0.641	0.361	Valid
Butir 12	0.617	0.361	Valid
Butir 13	0.684	0.361	Valid
Butir 14	0.629	0.361	Valid
Butir 15	0.596	0.361	Valid

Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2020

Tabel di atas menunjukkan variabel pengendalian internal dari 15 butir pernyataan mempunyai kriteria valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dari pada r_{tabel} yaitu 0,361.

Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Publik (X_2)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Butir 1	0.620	0.361	Valid
Butir 2	0.660	0.361	Valid
Butir 3	0.687	0.361	Valid
Butir 4	0.703	0.361	Valid
Butir 5	0.577	0.361	Valid
Butir 6	0.565	0.361	Valid
Butir 7	0.630	0.361	Valid
Butir 8	0.684	0.361	Valid
Butir 9	0.693	0.361	Valid
Butir 10	0.603	0.361	Valid
Butir 11	0.567	0.361	Valid
Butir 12	0.549	0.361	Valid
Butir 13	0.554	0.361	Valid
Butir 14	0.581	0.361	Valid
Butir 15	0.600	0.361	Valid
Butir 16	0.764	0.361	Valid
Butir 17	0.522	0.361	Valid
Butir 18	0.611	0.361	Valid
Butir 19	0.552	0.361	Valid
Butir 20	0.518	0.361	Valid

Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2020

Tabel 4.8. menunjukkan variabel pelayanan publik dari masing-masing 20 butir pertanyaan mempunyai kriteria valid karena semua nilai r semua butir pertanyaan lebih besar dari pada r_{tabel} yaitu 0,361.

Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Laporan Keuangan (Y)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Butir 1	0.640	0.361	Valid
Butir 2	0.787	0.361	Valid
Butir 3	0.634	0.361	Valid
Butir 4	0.795	0.361	Valid
Butir 5	0.634	0.361	Valid
Butir 6	0.643	0.361	Valid
Butir 7	0.706	0.361	Valid
Butir 8	0.730	0.361	Valid

Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2020

Tabel 4.9. menunjukkan variabel transparansi laporan keuangan dari masing-masing 8 butir pertanyaan mempunyai kriteria valid karena semua nilai r semua butir pertanyaan lebih besar dari pada r_{tabel} yaitu 0,361.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan. Hasil dari pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan *reliabel* atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Dalam pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode statistik *Cronbach Alpha* dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,6 dimana jika nilai *Cronbach Alpha* dari suatu variabel lebih besar dari 0,6 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronbach Alpha* dari suatu variabel lebih kecil dari 0,6 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas ditunjukkan dalam table berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah butir pertanyaan	Cronbach alpha	Keterangan
Pengendalian Internal (X_1)	15	0.895	Reliabel
Pelayanan Publik (X_2)	20	0.911	Reliabel
Transparansi Laporan Keuangan (Y)	8	0.846	Reliabel

Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa instrumen untuk setiap variabel penelitian adalah reliabel, karena α hitung $> 0,6$. pada variabel Pengendalian Internal (X_1) memiliki α 0,895 $> 0,6$. Pelayanan Publik (X_2) memiliki α hitung 0,911 $> 0,6$. Variabel Transparansi Laporan Keuangan (Y) memiliki α hitung 0,846 $> 0,6$. Dengan demikian berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas data, maka data penelitian yang sudah dikumpulkan layak untuk dianalisis.

4.5. Analisis Data

Pengujian Pengendalian Internal dan Pelayanan Publik terhadap Transparansi Laporan Keuangan dilakukan dengan pengujian statistik. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Statistical Product Service Solution (SPSS)* versi 23.0. Beberapa pengujian yang dilakukan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi) dan uji hipotesis (uji koefisien regresi secara parsial atau uji t, uji koefisien regresi secara bersama-sama atau uji F dan uji koefisien determinasi).

Adapun variabel yang diteliti oleh penulis yaitu Pengendalian Internal (X_1), pengendalian intern pemerintah (X_2), dan Transparansi laporan keuangan (Y). Sebelum melakukan uji hipotesis dilakukan dulu uji normalitas data untuk memenuhi kriteria normalitas data dan untuk memenuhi data yang BLUE (*Best, Linier, Unbiased, Estimator*).

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data yang berupa standar deviasi, rata-rata dan data statistik lainnya. Berikut merupakan hasil statistik deskriptif untuk penelitian ini:

Tabel 4.11. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	56	54.00	69.00	62.2321	3.65807
X2	56	75.00	93.00	82.9821	4.94512
Y	56	26.00	39.00	32.4643	3.57244
Valid N (listwise)	56				

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23, 2020)

Pada Tabel 4.8 di atas, terlihat hasil pengujian deskriptif statistik. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengendalian Internal (X₁), Pelayanan Publik (X₂), dan variabel dependen yaitu transparansi laporan keuangan (Y). Dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 56 sampel. Pada variabel pengendalian internal nilai rata-rata (*mean*) sebesar 62,2321 dengan nilai maksimum 69.00, nilai minimum 54.00 dan standar deviasi 3,65807. Pada variabel pelayanan publik menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 82,9821 dengan nilai maksimum sebanyak 93.00 nilai minimum sebanyak 75.00 dan standar deviasi 4,94512. Pada variabel transparansi laporan keuangan menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 32,4643 dengan nilai maksimum 39,00, nilai minimum 26,00 dan standar deviasi 3,57244.

2. Analisis Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan dapat dipercaya. Asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh model regresi itu sendiri adalah residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas dan tidak adanya autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah yang memiliki residual terdistribusi normal. Untuk uji normalitas salah satu metode yang dapat digunakan yaitu uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Untuk lebih jelasnya, data dari uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.45860227
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.081
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.659
Asymp. Sig. (2-tailed)		.778

a. Test distribution is Normal.

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, 2021)

Dari tabel 4.12 yang merupakan output dari pengolahan data untuk uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,778. Dengan hasil signifikansi lebih dari 0,05 ($0,778 > 0,05$), maka nilai residual dari nilai uji tersebut telah normal.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen. Uji multikolinearitas dilihat dari hasil pengujian yang mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan mempunyai angka *tolerance* lebih dari 0,10. Uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.327	6.291		2.436	.018		
	Pengendalian_Internal	.288	.122	.295	2.370	.021	.577	1.734
	Pelayanan_Publik	.360	.090	.498	4.002	.000	.577	1.734

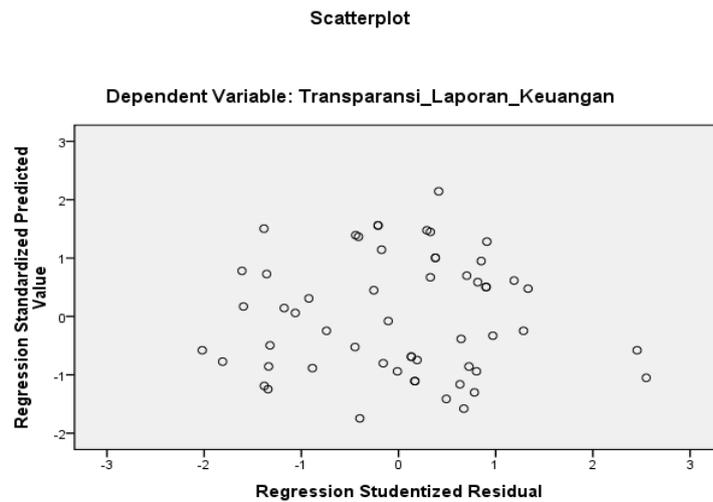
a. Dependent Variable: Transparansi_Laporan_Keuangan

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, 2020)

Dari Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* kedua variabel lebih dari 0,10 yaitu pengendalian internal sebesar 0,577, dan variabel pelayanan publik sebesar 0,577. Dan untuk nilai VIF kurang dari 10 yaitu variabel pengendalian internal sebesar 1,734, variabel pelayanan publik sebesar 1,734. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolerasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas dapat dengan metode *scatter plot*. Jika pada *scatter plot* memiliki titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika membentuk pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode *scatter plot*.



Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SPSS 23. dapat diketahui bahwa plot atau titik-titik menyebar secara merata baik di atas maupun di bawah garis nol, serta tidak menumpuk di satu titik sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji statistik ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas pada data penelitian.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan mengetahui dalam model regresi ada atau tidaknya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain. Menurut Priyatno (2016) menyatakan bahwa model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin Watson (DW Test). Syarat tidak adanya autokorelasi di dalam model regresi linier apabila $du < d < 4-du$. Berikut ini hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.14. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.726 ^a	.526	.508	2.505	1.942

a. Predictors: (Constant), Pelayanan_Publik, Pengendalian_Internal

b. Dependent Variable: Transparansi_Laporan_Keuangan

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji autokorelasi tersebut, diketahui nilai DW 1.942, selanjutnya nilai ini dibandingkan nilai tabel signifikansi 5%. Jumlah sampel $N = 56$ dan jumlah variabel independen 2 ($K=2$), maka diperoleh nilai du 1.6430. Nilai DW lebih besar dari batas atas (du) yakni $1.942 > 1.6430$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Untuk melakukan analisis regresi berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi seperti uji asumsi klasik yang telah dilakukan

sebelumnya dalam penelitian ini seperti: residual yang terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas serta tidak adanya autokorelasi. Berikut adalah penyajian dari hasil analisis regresi linear berganda:

Tabel 4.14. Hasil Uji Koefisien Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.327	6.291		2.436	.018		
	Pengendalian_Internal	.288	.122	.295	2.370	.021	.577	1.734
	Pelayanan_Publik	.360	.090	.498	4.002	.000	.577	1.734

a. Dependent Variable: Transparansi_Laporan_Keuangan

Berikut ini hasil persamaan regresi linear berganda dari data yang terdapat pada tabel 4.15:

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + e$$

$$Y = 15,327 + 0,288 \text{ pengendalian internal} + 0,360 \text{ pelayanan publik} + e$$

Keterangan:

Y = transparansi laporan keuangan

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi untuk pengendalian internal

X₁ = Pengendalian internal

b₂ = Koefisien regresi pelayanan publik

X₂ = pelayanan publik

E = Error

Interprestasi dari regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut:

a. Konstanta

Konstanta sebesar 15,327 artinya apabila semua variabel independen yaitu pengendalian internal dan pelayanan publik nilainya adalah 0 (nol) maka transparansi laporan keuangan nilainya positif 15,327.

b. Koefisien Regresi Variabel Pengendalian Internal

Koefisien regresi variabel Pengendalian Internal sebesar 0,288 artinya jika pengendalian internal mengalami kenaikan 1 satuan, maka transparansi laporan keuangan mengalami kenaikan sebesar 0,288 satuan.

c. Koefisien Regresi Variabel Pelayanan Publik

Koefisien regresi variabel pelayanan publik sebesar 0,360 artinya jika pelayanan publik mengalami kenaikan 1 satuan, maka transparansi laporan keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,360 satuan.

4. Analisis Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembuktian atas jawaban sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis terdiri dari: uji koefisien regresi secara parsial (Uji t), uji koefisien regresi secara simultan (Uji F) dan uji koefisien determinasi.

a. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji koefisien regresi secara parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Pengujian hasil koefisien regresi secara parsial menunjukkan hasil seperti berikut ini:

Tabel 4.16. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.327	6.291		2.436	.018		
	Pengendalian_Internal	.288	.122	.295	2.370	.021	.577	1.734
	Pelayanan_Publik	.360	.090	.498	4.002	.000	.577	1.734

a. Dependent Variable: Transparansi_Laporan_Keuangan

Koefisien regresi secara parsial yang ditunjukkan pada tabel 4.16 mendapatkan hasil bahwa, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_1 diterima, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_1 ditolak. Untuk menentukan t_{tabel} dengan dengan df (*degree of freedom*) atau derajat kebebasan dicari dengan rumus $n-k$ atau $56-2=54$, sehingga diperoleh $t_{tabel} = 2.005$.

Dilihat dari hasil pada tabel 4.16 terlihat bahwa variabel pengendalian internal (X_1) memiliki nilai signifikansi 0,021 dan t_{hitung} sebesar 2,370. Karena signifikansi kurang dari 0,05 ($0,021 < 0,05$) dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,370 > 2,005$) maka H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian internal (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan (Y).

Berdasarkan signifikansi terlihat bahwa variabel pelayanan publik (X_2) memiliki nilai signifikansi 0,000 dan t_{hitung} sebesar 4,002. Karena signifikansi kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,002 > 2,005$) maka H_2 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan.

b. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model yaitu akuntabilitas (X_1) dan pengendalian internal pemerintah (X_2), secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Seluruh variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$. Berikut merupakan uji F terkait dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen.

Tabel 4.17. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	369.469	2	184.734	29.450	.000 ^a
	Residual	332.460	53	6.273		
	Total	701.929	55			

a. Predictors: (Constant), Pelayanan_Publik, Pengendalian_Internal

b. Dependent Variable: Transparansi_Laporan_Keuangan

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, 2021)

Berdasarkan tabel ANOVA pada tabel 4.17 dapat dilihat bahwa nilai variabel independen F_{hitung} sebesar 29.450. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% $\alpha = 5\%$, df_1 (jumlah variabel -1) = 3, dan df_2 (n-k-1) atau $56-2-1 = 53$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 3,17. Tabel ANOVA diatas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 dan F_{hitung} sebesar 29,450 dimana nilai ($F_{hitung} > F_{tabel}$) ($29,450 > 3,17$), yang berarti bahwa H_3 diterima maka semua variabel independen (pengendalian internal dan pelayanan publik yang dimasukkan dalam model regresi linear berganda berpengaruh terhadap variabel dependen (transparansi laporan keuangan).

c. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model (variabel-variabel independen) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 4.18. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.726 ^a	.526	.508	2.505	1.942

a. Predictors: (Constant), Pelayanan_Publik, Pengendalian_Internal

b. Dependent Variable: Transparansi_Laporan_Keuangan

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, 2021)

Berdasarkan hasil tabel 4.18 uji koefisien determinasi terlihat bahwa perolehan *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,508 atau 51%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal dan pelayanan publik sebagai variabel independen mampu memberikan sumbangan pengaruh terhadap transparansi laporan keuangan sebagai variabel dependen sebesar 51% sedangkan 49% adalah pengaruh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

4.6. Pembahasan

Hasil dari hipotesis penelitian telah diuraikan secara statistik dengan menggunakan SPSS versi 23, melalui uji secara parsial (uji statistik t), uji secara

simultan (uji statistik F) dan secara uji determinasi. Hasil dari hipotesis penelitian disajikan sebagai berikut:

4.6.1. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji t terlihat bahwa variabel pengendalian internal (X_1) memiliki nilai signifikansi 0,000 dan t_{hitung} sebesar 2,370. Karena signifikansi kurang dari 0,05 ($0,021 < 0,05$) dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,370 > 2,005$) maka H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian internal (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor (Y).

Hal ini menunjukkan bahwa jika sistem pengendalian terhadap proses pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang handal dan informatif, terciptanya pengamanan aset negara serta menjamin ketaatan dan kepatuhan setiap instansi terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan sistem pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian intern tersebut harus memuat prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah (PP No. 8 Tahun 2006).

Penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatan waktu dan keterandalan.

4.6.2. Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji t terlihat bahwa variabel pelayanan publik memiliki nilai signifikansi 0,000 dan t_{hitung} sebesar 4,002. Karena signifikansi kurang dari

0,05 ($0,000 < 0,05$) dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,002 > 2,005$) maka H_2 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.

Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan. Artinya, semakin tinggi pelayanan publik yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya transparansi laporan keuangan. Pelayanan publik akan semakin meningkat dipengaruhi oleh meningkatnya transparansi laporan keuangan yaitu bahwa informasi pelayanan publik yang handal akan menggiring persepsi yang tinggi dimata masyarakat mengenai transparansi laporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Aini et al. (2016) menunjukkan bahwa pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan.

4.6.3. Pengaruh Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel ANOVA dilihat bahwa nilai variabel independen F_{hitung} sebesar 29.450. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% $\alpha = 5\%$, df 1 (jumlah variabel -1) = 3, dan df 2 (n-k-1) atau $56-2-1 = 53$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 3,17. Tabel ANOVA diatas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 dan F_{hitung} sebesar 29,450 dimana nilai ($F_{hitung} > F_{tabel}$) ($29,450 > 3,17$), yang berarti bahwa H_3 diterima maka semua variabel independen (akuntabilitas dan pengendalian internal pemerintah) yang dimasukkan dalam model regresi linear berganda berpengaruh terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan).

Perhatian terhadap isu pengendalian internal dan pelayanan publik semakin meningkat yang disebabkan oleh salah satu faktor yaitu desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Maka faktor utama untuk mewujudkannya yaitu dengan penyajian laporan keuangan yang transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk mengetahui hasil riil dari penyajian laporan keuangan itu sendiri diperoleh dengan melihat pengaruhnya pada pengendalian internal dan pelayanan publik tersebut.

Mahmudi (2017: 27) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi

didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan pelayanan publik terhadap transparansi laporan keuangan pada bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t terlihat bahwa variabel pengendalian internal (X_1) memiliki nilai signifikansi 0,021 dan t_{hitung} sebesar 2,370. Karena signifikansi kurang dari 0,05 ($0,021 < 0,05$) dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,370 > 2,005$) maka H_1 diterima.
2. Terdapat pengaruh pelayanan publik terhadap transparansi laporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t terlihat bahwa variabel pelayanan publik memiliki nilai signifikansi 0,000 dan t_{hitung} sebesar 4,002. Karena signifikansi kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,002 > 2,005$) maka H_2 diterima.
3. Terdapat pengaruh pengendalian internal dan pelayanan publik terhadap transparansi laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji F bahwa variabel independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 dan F_{hitung} sebesar 29,450 dimana nilai ($F_{hitung} > F_{tabel}$) ($29,450 > 3,17$), yang berarti bahwa H_3 diterima.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan terkait keterbatasan penelitian ini, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut:

1. Saran Praktis
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pembangunan Daerah kabupaten Bogor perlu melakukan
 - a. Transparansi yang lebih instensif tentang laporan keuangan dan hasil audit yang dipublikasikan baik melalui website resmi maupun sarana lain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik

b. Evaluasi kembali tentang program pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat

2. Saran akademis

Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang sama atau serupa, agar menambahkan indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini sehingga diperoleh kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara pengendalian internal dan pelayanan publik dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. (2015). Pengaruh pengendalian internal, akuntabilitas, tekanan eksternal dan komitmen pimpinan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan (studi empiris pada skpd kota pekanbaru). *Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015*
- Andriyani, L. (2015). Pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jom FEKON*, 3(1), 204–208.
- Arens, A. A, Randal J.E, Mark S. B. (2013). *Audit dan jasa assurance: pendekatan terpadu (penerjemah herman wibowo)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arfianti, D. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten batan. Tesis tidak diterbitkan. Univeristas Diponegoro. Semarang.
- Arifin. (2015). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S, (2014). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi sektor publik suatu pengantar* Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- BPK RI. (2017). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I (IHPS I) Tahun 2017*
- Committee of Sponsoring Organization (COSO). (2019). *Pengendalian internal dan manajemen resiko*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO). (2019). *Internal control-integrated framework*
- Gelinas. U.J. (2012). *Accounting information system* 9th Edition. South-Western Cengage Learning: USA
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program ibm spss 23 (edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, D.N. (2013). *Dasar-dasar ekonometrika (Alih Bahasa: Mangunsong, R.C)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A dan Syam K. (2015). *Akuntansi sektor publik: teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jabbara, J.G. dan O. P. Dwivedi. (2013). *Publik service accountability, A comparative perspective connecticut*: Kumarian
- Karianga, H, (2015). *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah*. Bandung: PT Alumni.

- Kresiadanti, A.R.R. (2012). Pengaruh internal control dan internal auditor terhadap akuntabilitas di Universitas Brawijaya. (Studi pada Fakultas dan Program di Universitas Brawijaya yang telah diaudit oleh Satuan Pengendalian Internal Universitas Brawijaya tahun 2012). *Tesis Pascasarjana*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- LAN & BPKP. (2014). *Akuntabilitas dan good governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Ledo, D., & Ayem, S. (2017). Pengaruh aspek-aspek manajemen keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 25(2), 161-175.
- Lubis, N.K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan dan pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, Vol. 1, No. 2, DESEMBER 2017
- Mahmudi. (2017). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: Unit penerbit & Percetakan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardi, (2015), *Sistem informasi akuntansi*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Mardiasmo, (2016). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- , (2016). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Martini, R, Naufal L, Sukmini H, Zulkifli, Endah W. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi 2019 Volume 2 No.1*
- Masyhur, M. (2017). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota dumai. *JOM Fekon*, Vol. 4 No.1 (Februari) 2017.
- Maulidiyah, N. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kepercayaan donatur di yayasan sosial keagamaan. Neraca: *Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 1, No. 1, Oktober 2019, pp. 1-8. E ISSN 2715-1212*
- Meijer, A.D., J.L. Heitman, J.G. White, and R.E. Austin. (2013). Measuring erosion in long term tillage plots using grounds based lidar. *Journal Soil and Erosion*, 126: 1-10
- Meuthia, G.R. (2014). *Good governance, prinsip, komponen, dan penerapannya dalam hak asasi manusia (penyelenggaraan negara yang baik)*. Jakarta: Penerbit Komnas HAM.
- Mulyadi. (2013). *Sistem akuntansi*, Edisi 3. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- Nugraha, D.S dan Apriyanti S, (2010). The Influence of internal control system to the reliability of local government financial statement (case study at

pemerintah provinsi jawa barat), *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 2

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Perubahan Atas 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Priyatno, D. (2018). *Analisis korelasi, regresi dan multivariate dengan spss*. Jogjakarta: Gava Media.

Purba, M. (2014). *Profesi akuntan publik di indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ratna. P.S. (2020). Pentingnya pengendalian internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 6 No. 1., Mei 2020*

Renyowijoyo, M. (2015). *Akuntansi sektor publik: organisasi non laba*, Edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Salle, A. (2016). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *keuda: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 1(1), 1-19.*

Sari, D. (2014). Pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. *PROCEEDINGS ISSN- 2252-3936. Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesiona*

Sari, I dan Nur A. (2017). Pengaruh good governance dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember 12 (2): 32-42.*

Sari, R.P. (2020). Pentingnya pengendalian internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 6 No. 1., Mei 2020. ISSN : 2460-1233*

Sinambela, L.P. (2015). *Reformasi pelayanan publik, teori kebijakan dan implementasi*, cetakan kelima. Jakarta : PT Bumi Aksara

- Steccolini, I, (2012), *Local government annual report perception of financial accountability reporting of local government*. Jurnal Akuntansi Keuangan Sektor Publik, Vol.3, no.1.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung, Alfabeta.
- Tanjung, A.H. 2016. *Akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan publik (sebuah tantangan)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Winidyaningrum, C. dan Rahmawati. (2014). Pengaruh sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian, *Intern Akuntansi. SNA XIII Purwokerto*
- Wirawan, R.C. (2019). Antecedent transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada opd pemerintah daerah kota magelang). *Wahana Riset Akuntansi Vol. 7, No 2, Oktober 2019, Hal 1551-1566 ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online)*.
- Wirawan, R.C. (2019). Antecedent transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada opd pemerintah daerah kota magelang). *Wahana Riset Akuntansi Vol. 7, No 2, Oktober 2019, Hal 1551-1566. ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online)*
- Yendrawati, R. (2015). Pengaruh pengefektifan pengendalian intern dan audit intern terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi 11 (1): 18 – 42*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Tempat dan tanggal lahir :

Umur :

Agama :

Pendidikan

• SD :

• SMP :

• SMA :

• Perguruan Tinggi :

Bogor, Juli 2021

Peneliti,

LAMPIRAN

Lampiran 1

DEMOGRAFI RESPONDEN

Nama Instansi :
Nama Responden :
Jenis Kelamin : Laki – Laki / Perempuan

Pendidikan Terakhir :

- Diploma (D3)
- Strata 1 (Sarjana)
- Strata 2 (Master)

Lama Bekerja :

- 2 – 3 tahun
- 4 – 5 tahun
- ≥ 5 tahun

PETUNJUK PENGISIAN

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda silang (X) di antara nomor 1 sampai nomor 5, dengan petunjuk sebagai berikut:

1. SL = Selalu
2. SR = Sering
3. KK = Kadang-kadang
4. JR = Jarang
5. TP = Tidak Pernah

KUESIONER PENELITIAN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR

KUESIONER PENELITIAN

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan anda mengisi kuesioner ini.

Adapun kami sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh:

Nama : Theresia May Siski Sihotang
NPM : 022116249
Jurusan : S1 Akuntansi
Universitas : Pakuan Bogor

Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir/skripsi kami yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal dan Pelayanan Publik terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor”. Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenaan meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti demi terselesainya penelitian ini. Sebelumnya saya juga memohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/Ibu/Saudara/i.

Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau SALAH dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara/i di tempat anda bekerja. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar luaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, sesuai etika penelitian.

Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya kuesioner ini. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari, peneliti mengucapkan terima kasih.

Peneliti

Theresia May Siski Sihotang
022116249

LEMBAR KUESIONER

Pengaruh Pengendalian Internal dan Pelayanan Publik terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor

VARIABEL PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

No	Pertanyaan	Lembar Jawaban				
		SL	SR	KK	JR	TP
Lingkungan pengendalian						
1	Karyawan ditempatkan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya					
2	Adanya Struktur organisasi dan job deskripsi yang jelas					
3	Terdapat kebijakan prosedur yang jelas mengenai kepegawaian, pengembangan, penilaian prestasi dan kompensasi kepada pegawai					
Penilaian Resiko						
4	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mampu mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan diseluruh entitas					
5	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.					
6	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mempertimbangkan kemungkinan adanya kecurangan dalam penilaian risiko.					
Kegiatan pengendalian						
7	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja memilih aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi (upaya untuk mengurangi) risiko dalam pencapaian tujuan					
8	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mengembangkan kegiatan pengendalian secara umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan.					
9	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mengimplementasikan pengendalian internal sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan					
Informasi dan komunikasi						
10	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mendapatkan informasi yang relevan serta berkualitas untuk mendukung pengendalian internal.					
11	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja					

	mengkomunikasikan secara internal mengenai pengendalian internal untuk mendukung komponen lainnya					
12	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mengkomunikasikan perihal pengendalian internal yang relevan kepada pihak eksternal					
Pemantauan pengendalian intern						
13	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja memilih evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengendalian internal ada dan berfungsi					
14	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mengevaluasi kekurangan pengendalian internal pada pihak yang bertanggung jawab					
15	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja menkomunikasikan kelebihan pengendalian internal pada pihak yang bertanggung jawab					

VARIABEL PELAYANAN PUBLIK

No	Pertanyaan	Lembar Jawaban				
		SL	SR	KK	JR	TP
Transparan						
1	Masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi keuangan di pemerintah daerah					
2	Laporan Keuangan dan Laporan hasil audit dipublikasikan di website resmi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor					
3	Akses untuk memperoleh dokumen tentang laporan keuangan mudah diperoleh					
4	Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor					
Akuntabilitas						
5	Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor					
6	Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor					
7	Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut					
8	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor					
Kondisional						
9	Pelayanan yang diberikan berpegang pada prinsip efisiensi					
10	Pelayanan yang diberikan berpegang pada prinsip efektivitas					
11	Pelayanan publik disesuaikan dengan kondisi saat ini					
12	Peningkatan kinerja dengan cara membandingkan laporan keuangan di tahun sebelumnya					

Partisipatif					
13	Publik selalu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan tentang pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor				
14	Peningkatan peran serta publik dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan pelayanan.				
15	Proses penyelenggaraan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,				
16	Mendorong peran serta pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.				
Kesamaan Hak					
17	Pemberian pelayanan publik tidak mengutamakan pribadi atau kelompok				
18	Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan				
19	Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi				
20	Pemenuhan hak sebanding dengan kewajiban yang dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan				

VARIABEL TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN

No	Pertanyaan	Lembar Jawaban				
		SL	SR	KK	JR	TP
<i>Invormativeness</i> (informatif)						
1	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor memberikan informasi laporan keuangan secara lengkap.					
2	Laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor mudah diakses					
3	Laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor yang disajikan tepat waktu					
4	Saya merasa transparansi pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor dapat mengakomodasi dan meningkatkan aspirasi/usulan publik.					
<i>Disclosure</i> (pengungkapan)						
5	Tersedianya sarana untuk suara dan usulan publik untuk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor					
6	Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik					
7	Publik diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor					
8	Tanggung jawab yang diberikan kepada publik mengenai laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan					

Lampiran 2

Tabulasi Penelitian

Pengendalian Internal																
No	Pernyataan															Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	3	64
2	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	3	67
3	5	2	3	3	5	4	5	3	5	5	4	5	4	3	4	60
4	4	5	2	4	4	5	4	2	4	4	4	2	5	4	4	57
5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	3	4	65
6	5	5	4	5	5	5	4	5	4	3	4	4	5	4	3	65
7	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	56
8	3	5	4	5	2	4	4	4	4	5	3	4	3	5	5	60
9	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	65
10	5	5	4	5	5	4	3	4	2	5	4	3	4	5	4	62
11	4	3	4	3	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	59
12	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	3	67
13	5	2	3	3	5	4	5	3	5	5	4	5	4	3	4	60
14	4	5	2	4	4	5	4	2	4	4	4	2	5	4	4	57
15	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	3	4	65
16	5	5	4	5	5	5	4	5	4	3	4	4	5	4	3	65
17	5	5	5	4	3	4	5	4	5	4	3	4	5	5	4	65
18	3	5	4	4	2	4	4	4	4	5	3	4	3	4	5	58
19	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	65
20	5	5	4	5	5	4	3	5	2	5	4	3	4	5	5	64
21	4	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	60
22	4	5	5	5	4	5	3	5	4	4	5	4	4	4	3	64
23	5	2	3	3	5	5	5	3	5	5	4	5	4	5	4	63
24	4	5	2	5	5	5	4	2	4	4	5	5	5	4	4	63
25	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	3	4	65
26	5	5	4	5	5	5	4	5	4	3	4	4	5	4	3	65
27	5	4	5	4	3	3	5	4	5	4	3	4	5	4	4	62
28	3	5	4	5	4	4	5	5	4	5	3	4	5	5	5	66
29	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	61
30	4	4	3	4	5	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	58
31	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	3	67
32	4	2	3	3	5	4	4	3	5	5	5	4	4	4	3	58
33	4	5	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	56
34	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	2	5	4	4	63
35	5	5	4	5	5	5	4	5	4	3	4	5	4	3	4	65
36	4	4	5	4	3	3	4	4	5	4	4	4	5	4	3	60
37	3	4	4	4	2	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	54
38	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	3	4	3	5	5	64
39	5	5	4	5	5	4	3	4	2	5	4	4	5	5	4	64

40	4	3	4	2	3	5	4	4	5	4	4	3	4	5	4	58
41	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	3	67
42	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	69
43	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	3	4	66
44	5	2	3	3	5	4	5	3	5	5	4	2	5	4	4	59
45	4	5	2	4	4	5	4	2	4	4	4	5	4	3	4	58
46	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	3	65
47	5	5	4	4	5	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	62
48	4	4	4	4	3	3	5	4	4	4	3	4	3	5	5	59
49	3	5	4	5	2	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	64
50	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	5	4	61
51	3	4	4	4	4	4	3	4	2	5	4	4	4	4	3	56
52	4	3	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	66
53	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	3	4	68
54	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	58
55	4	3	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	60
56	5	2	5	3	5	4	5	3	5	5	5	5	5	4	4	65

Pelayanan Publik

No	Pernyataan																				Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	5	3	3	5	4	5	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	4	4	78
2	3	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	90
3	4	5	5	4	5	4	5	4	3	4	2	5	4	3	4	2	4	4	3	4	78
4	5	3	3	5	4	5	3	3	5	4	5	2	4	4	4	4	2	4	4	4	77
5	4	2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	86
6	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	3	4	2	5	4	3	4	85
7	4	5	4	3	4	2	3	3	5	4	5	3	5	4	4	5	3	5	4	4	79
8	5	3	5	4	4	5	2	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	83
9	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	92
10	3	5	5	4	5	4	5	4	3	4	2	3	3	5	4	5	3	3	5	4	79
11	2	5	3	5	4	5	3	5	4	4	5	2	4	4	4	4	2	4	4	4	77
12	5	3	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	89
13	3	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	3	4	2	5	4	3	4	83
14	4	3	3	5	4	5	3	3	5	4	5	3	5	4	4	5	3	5	4	4	81
15	5	4	4	5	4	5	2	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	84
16	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	92
17	5	3	3	5	4	5	3	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	88
18	4	2	4	4	4	4	4	5	4	3	4	2	3	3	5	4	5	3	3	5	75
19	5	4	5	5	4	5	5	3	5	4	4	5	2	4	4	4	4	2	4	4	82
20	5	5	4	3	4	2	3	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	85
21	3	3	5	4	4	5	2	5	5	4	5	4	5	4	3	4	2	5	4	3	79
22	2	4	4	5	4	5	4	3	3	5	4	5	3	5	4	4	5	3	5	4	81
23	5	5	5	4	5	4	5	2	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	86
24	3	3	3	5	4	5	3	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	86
25	4	2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	83
26	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	3	90
27	4	3	3	5	5	5	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	4	5	79
28	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	3	5	4	90
29	4	5	5	4	5	4	5	4	3	4	2	5	4	3	4	2	5	4	3	4	79
30	5	3	4	5	4	3	3	5	3	5	2	4	4	4	5	2	4	4	4	4	77
31	5	2	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	86
32	3	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	3	4	2	5	4	3	4	2	80
33	2	5	4	3	4	3	3	5	4	5	3	5	4	4	5	3	5	4	4	5	80
34	5	3	5	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	80
35	3	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	89
36	4	5	5	4	5	5	4	3	4	2	3	3	5	4	5	3	3	5	4	5	81
37	5	3	3	5	4	3	5	4	4	5	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	77
38	4	2	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	86
39	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	3	4	2	5	4	3	4	2	82
40	4	3	3	5	4	3	3	5	4	5	3	5	4	4	5	3	5	4	4	5	81
41	5	4	4	5	4	2	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	84

42	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	93
43	3	3	3	5	4	5	3	5	4	4	5	3	5	4	4	5	4	5	4	3	81
44	2	2	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	3	80
45	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	92
46	3	5	4	3	4	2	3	3	5	4	5	3	3	5	4	5	3	4	5	5	78
47	4	3	5	4	4	5	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	3	4	77
48	5	4	4	5	4	3	3	5	4	5	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	78
49	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	92
50	5	3	3	5	4	5	5	4	5	4	5	4	3	4	2	5	4	3	4	2	79
51	4	2	4	4	4	3	3	5	4	5	3	5	4	4	5	3	5	4	4	5	80
52	5	4	5	5	4	2	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	85
53	5	3	3	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	89
54	3	4	4	5	4	5	4	3	4	2	3	3	5	4	5	3	3	5	4	5	78
55	2	5	5	4	5	3	5	4	4	5	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	78
56	5	3	3	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	88

Transparansi Laporan Keuangan									
No	Pernyataan								Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	4	3	2	4	3	4	4	28
2	4	5	5	4	4	5	4	2	33
3	2	4	4	5	2	4	5	4	30
4	3	4	5	5	4	2	2	5	30
5	5	3	5	2	5	4	4	3	31
6	4	5	5	4	3	5	5	5	36
7	3	4	4	4	2	3	2	4	26
8	4	3	5	4	4	2	4	4	30
9	4	5	5	5	5	4	5	3	36
10	3	4	2	4	3	5	3	2	26
11	4	3	4	4	2	3	2	4	26
12	5	5	2	5	4	5	4	5	35
13	4	5	4	4	5	4	5	4	35
14	5	4	4	5	3	4	3	4	32
15	3	4	4	5	5	3	4	5	33
16	4	5	5	4	5	4	5	4	36
17	4	4	5	5	4	5	4	5	36
18	5	4	3	3	4	4	4	3	30
19	3	4	4	4	4	4	4	2	29
20	5	5	4	5	5	4	5	4	37
21	4	4	3	5	4	3	2	5	30
22	4	4	4	4	4	4	5	3	32
23	5	3	5	5	4	5	4	5	36
24	4	4	5	5	5	4	5	4	36
25	4	3	4	5	4	4	3	4	31
26	5	5	5	4	5	5	4	5	38
27	4	4	5	4	5	5	5	5	37
28	5	5	4	5	4	5	4	3	35
29	3	3	4	4	5	3	5	4	31
30	2	4	4	4	4	4	4	5	31
31	4	5	5	4	5	5	5	4	37
32	5	4	3	4	2	3	3	4	28
33	3	4	4	4	5	2	4	4	30
34	4	4	4	4	5	4	4	5	34
35	5	5	4	5	4	5	4	3	35
36	3	3	4	4	4	3	5	4	30
37	2	4	4	3	4	4	3	3	27
38	4	5	5	4	5	5	5	4	37

39	5	4	3	5	2	3	3	5	30
40	3	5	4	4	5	2	4	4	31
41	4	4	5	4	5	4	5	4	35
42	5	5	5	5	5	4	5	5	39
43	3	3	4	4	4	5	4	3	30
44	2	4	3	3	4	4	4	2	26
45	4	5	2	4	4	4	4	4	31
46	5	4	4	4	4	4	3	5	33
47	3	4	4	4	3	4	2	3	27
48	4	4	5	4	5	4	5	5	36
49	5	5	4	5	4	5	4	5	37
50	3	3	4	4	5	4	4	4	31
51	2	4	4	3	4	5	4	4	30
52	4	5	5	5	5	4	4	4	36
53	5	4	5	4	5	5	4	5	37
54	3	5	4	5	5	3	4	2	31
55	4	4	3	4	4	4	4	5	32
56	5	5	4	5	4	4	4	5	36